



MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS XI



**Oleh:
Elvia Roza, S.Pd**

**SMK WIKRAMA BOGOR
2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I Kolonialisme Bangsa Eropa Di Indonesia	1
BAB II Dampak Penjajahan Bangsa Eropa Di Indonesia	15
BAB III Organisasi Pergerakan Nasional	18
BAB IV Peristiwa Sekitar Proklamasi Dan Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	97
BAB V Disintegrasi Nasional.....	106
BAB VI Peran Tokoh Nasional Dan Daerah Yang Berjuang Mempertahankan Kemerdeakaan	123
BAB VII Perkembangan Kehidupan Politik, Sosial Dan Ekonomi Pada Masa Awal Kemrdekaan Sampai Masa Demokrasi Liberal.....	128
BAB VIII Latarbelakang Lahirnya Demokrasi Terpimpin	146
BAB IX Orde Baru.....	153
BAB X Masa Reformasi	161

BAB I

Kolonialisme Bangsa Eropa Di Indonesia

I. Kedatangan Bangsa Eropa ke Indonesia dan Terbentuknya Kolonialisme

Kolonialisme adalah penguasaan oleh suatu negara atau bangsa atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan mencari keuntungan besar di daerah/ negara lain. Sebab-sebab bangsa Eropa melakukan penjelajahan Samudera :

- a. Kekalahan orang-prang Nasrani dalam perang Salib ketika melawan bangsa Turki
- b. Keinginan untuk mendapatkan sumber rempah-rempah sehingga dapat memperoleh dengan harga murah
- c. Semboyan 3 G (Gold, Glory, Gospel), yaitu keinginan untuk mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama nasrani
- d. Ditemukannya kompas sebagai penunjuk arah mata angin
- e. Ditemukannya bahan peledak yang dapat digunakan sebagai senjata

A. Kolonialisme dan Imperialisme Portugis di Nusantara

Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia dipelopori oleh Bartolomeus Diaz, penjelajah Portugis pertama kali yang terdampar di Tanjung Harapan (Afrika selatan) pada tahun 1486. Penjelajahannya dilanjutkan oleh Vasco De Gama yang berhasil mendarat di Calicut, India pada tahun 1498. Kemudian dilanjutkan kembali oleh Alfonso de Al Buquerque yang berhasil mendarat di Malaka pada tahun 1511. Pada tahun 1512 para pelaut Portugis berhasil mendarat di Maluku sumbernya rempah-rempah. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku tidak melalui jalur perdagangan di Nusantara, karena orang-orang Portugis mengalami kekalahan ketika menghadapi pasukan Demak yang dipimpin oleh Faletihan.

Penjelajahan Portugis diikuti oleh bangsa lainnya, seperti Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tujuan utama mereka melakukan penjelajahan samudera adalah mencari sumber rempah-rempah , karena rempah-rempah yang sangat dibutuhkan bangsa Eropa, namun harga rempah-rempah di Eropa sangat mahal setelah berakhirnya perang Salib dan ditutupnya kota perdagangan utama di Bizantium (Konstantinopel) oleh bangsa Turki pada tahun 1453.

Pada tahun 1521 penjelajah Spanyol berhasil mendarat di kep. Masawa , Filipina di bawah pimpinan Magelheins dan Sebastian Del Cano setelah mengarungi samudera Atlantik dan samudera Pasifik. Namun Magelheins tewas di kepulauan tersebut. Keberhasilan Orang-orang Spanyol di Filipina mereka telah membuktikan bahwa bumi itu benar-benar bulat. Perjalanan pulang tidak kembali ke arah timur, melainkan ke arah barat, sehingga Sebastian Del Cano dkk, orang yang pertama berhasil mengelilingi bumi.

Antara Portugis dan Spanyol bersaing untuk mendapatkan wilayah Maluku dan Filipina , guna menghindari perang maka kedua negara tersebut mengadakan perundingan yang dikenal dengan Perundingan Saragosa dan Tordesillas.

Kesepakatan yang dicapai dalam perundingan tersebut adalah Wilayah Filipina menjadi wilayah kekuasaan Spanyol, sedangkan wilayah Maluku menjadi wilayah kekuasaan Portugis. Untuk memperkuat kedudukannya maka Portugis membangun benteng pertahanan yang di Ternate, namun tidak bertahan lama karena dikalahkan oleh raja Ternate yang bernama Sultan Baabullah. Akhirnya orang-orang Portugis menetap di Timor Timur hingga tahun 1976. Selain kekalahannya dari Sultan Baabullah mereka meninggalkan Ternate juga disebabkan adanya pedagang-pedagang Belanda yang telah berhasil mendapatkan sumber rempah-rempah.

B. Kolonialisme dan Imperialisme Belanda di Nusantara

Kedatangan orang-orang Belanda di Indonesia dipelopori oleh Cornelis de Houtman, yang mendaratkan 4 buah kapalnya di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Namun mengalami kegagalan dalam menjalin kerja sama dengan kerajaan setempat . Pada tahun 1598 Belanda mengirimkan ekspedisinya kembali dibawah pimpinan Yacob Van Neck, dan kerajaan Banten menyambut dengan baik karena sedang bermusuhan dengan para pedagang Portugis yang telah banyak merugikan pedagang-pedagang Banten. Sebab pelabuhan Malaka telah dikuasai oleh Portugis.

Pada tanggal 20 Maret 1602 Orang-orang Belanda di Indonesia mendirikan kongsi dagang yang dikenal dengan VOC (Verenigde Oost Compagnie), Tujuan didirikan VOC antara lain :

- a. Mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk membiaya perang melawan Spanyol.
- b. Melindungi para kongsi dagang Belanda dari kongsi dagang negara lain
- c. Menghindari persaingan tidak sehat sesama pedagang Belanda.
- d. Memperkuat kedudukannya di daerah jajahan

Agar dapat memperoleh keuntungan besar maka VOC mendapatkan hak-hak istimewa (hak ekstirpasi) dari pemerintah Belanda antara lain :

- a. VOC memiliki kebebasan mencetak uang sendiri tanpa harus mendapatkan dari pemerintah Belanda
- b. VOC memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan setempat
- c. VOC dapat membentuk tentara sendiri di daerah jajahan serta mengadakan perang.
- d. Melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di daerah jajahan, semua hasil rempah rempah harus dijual kepada kongsi dagang Belanda

Dengan adanya kebijakan di atas maka kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara banyak dirugikan, karena VOC membeli rempah-rempah dengan harga yang murah. Sehingga timbul perlawanan terhadap VOC di berbagai daerah, seperti halnya. Perlawanan Sultan Nuku (Tidore), Perlawanan Sultan Agung , perlawanan sultan Hassanudin (Makasar), dan Perlawanan Untung Surapati. Karena banyak mengalami kerugian. Beberapa faktor yang menyebabkan kerugian VOC antara lain :

1. Korupsi yang dilakukan oleh para pegawai VOC
2. Banyaknya biaya untuk perang menghadapi perlawanan rakyat di daerah jajahan
3. Persaingan dari kongsi dagang lainnya , seperti : Inggris, Portugis, dan Spanyol
4. Biaya operasional VOC sangat besar, karena wilayah yang dikuasainya sangat luas

C. Kolonialisme dan Imperialisme Inggris di Nusantara

Pada tahun 1808 Belanda dikuasai oleh Perancis sehingga secara tidak langsung Indonesia berada dibawah pengaruh imperialisme Perancis . Indonesia diperintah oleh Gubernur Jendral Daendels (1808-1811). , Karena dinilai terlalu keras dalam menjalankan pemerintahan maka ia diganti oleh Jendral Jansens. Dalam masa pemerintahannya ia menghadapi situasi sangat sulit, yaitu dengan datangnya pasukan Inggris.

Pada tanggal 3 Agustus 1811 Angkatan Laut Inggris di bawah pimpinan Lord Minto muncul di Banten, dengan tegas meminta kepada Jansens agar menyerahkan pulau Jawa kepada pihak Inggris melalui perjanjian Tuntang pada tahun 1811 . Isi perjanjian Tuntang antara lain :

- a. Seluruh kekuatan militer Belanda yang berada di kawasan Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris
- b. Utang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris
- c. Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris.

Kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles (1811-1816) menjadi Gubernur di Indonesia Mewakili raja muda Lord Minto. Raffles memerintah di Indonesia selama 5 tahun. Walaupun hanya 5 tahun Raffles banyak mengadakan perubahan ekonomi terutama dalam hal perpajakan, antara lain :

- a. Segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan
- b. Peranan bupati sebagai pemungut penyerahan wajib dihapuskan , dan sebagai gantinya adalah mereka dijadikan sebagai aparat pemerintah yang bertanggung jawab kepada pemerintah
- c. Pemerintah Inggris merupakan satu-satunya pemilik tanah

Keuntungan rakyat dengan adanya perpajakan yang dilakukan oleh Raffles antara lain :

1. Rakyat mendapat kebebasan menanam tanaman yang menguntungkan sesuai dengan ketrampilan
2. Rakyat membayar sewa tanah sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa khawatir adanya pungutan liar atau pemerasan
3. Rakyat akan tergerak untuk terus meningkatkan hasil pertaniannya, karena akan dapat meningkatkan kehidupannya.

Bagi Inggris sendiri dengan adanya perpajakan memberikan keuntungan, antara lain : Pemerintah akan mendapatkan pendapatan secara tetap dan terjamin dan dengan meningkatkan hasil panen dapat meningkatkan perolehan pajak dari masyarakat. Jasa Raffles terhadap bangsa Indonesia antara lain :

- a. Indonesia diperkenalkan sistem perpajakan (Landrent System)
- b. Ditemukan bunga terbesar di dunia , yaitu bunga Rafflesia di Bengkulu
- c. Rencana pembangunan Kebun Raya Bogor, untuk melindungi tanaman langka di dunia.

Ketika Perancis mengalami kekalahan dari pada tahun 1816 maka pemerintahan Inggris di Indonesia dikembalikan kepada Belanda dengan ditandatangani Perjanjian London. Dengan demikian Indonesia dijajah oleh Inggris selama 5 tahun.

D. Kebijakan Pemerintah Kolonial

Masa Pemerintahan Daendels (1808-1811) Ia memerintah atas rekomendasi Napoleon Bonaparte, karena Belanda berada di bawah kekuasaan Perancis. Kebijakan yang dilakukan antara lain :

- a. Merombak sistem pemerintahan feodal menjadi pemerintahan Barat modern
- b. Menjadikan para penguasa wilayah seperti bupati, dan bangsawan lainnya menjadi pegawai pemerintah kolonial
- b. Membagi pulau jawa menjadi 9 perfektur
- c. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan
- d. Membangun pelabuhan dan kapal-kapal baru
- e. Memperbanyak prajurit dan peningkatan gaji serta kesejahteraannya di Hindia Belanda
- f. Menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan
- g. Membentuk pengadilan keliling dan pengadilan untuk kaum pribumi
- h. Memberantas korupsi dan menghapus kontingentel (penyerahan wajib)
- i. Menyederhanakan upacara –upacara di keratin Yogyakarta dan Surakarta.

E. Kebijakan Ekonomi Pemerintah Hindia Belanda (1816 – 1900)

Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Belanda mengundang reaksi keras dari kalangan Belanda sendiri, yaitu dari kaum liberalis Belanda. Mereka berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberikan keuntungan kepada negeri induk apabila urusan ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. Pemerintah kolonial hanya mengawasi jalannya pemerintahan dan memungut pajak tidak perlu mencampuri urusan perdagangan. Pada tahun 1819 pemerintah Belanda memilih kebijakan dari politik liberal yang dipimpin oleh Gubernur Jendral Van der Capellen. Pada tahun 1830 kebijakan politik liberal banyak mengalami hambatan oleh karena itu kebijakan politik liberal diubah menjadi politik konservatif.

Keuangan negeri Belanda benar-benar mengalami kekosongan setelah menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan perang menghadapi Belgia yang ingin memisahkan diri dari Belanda. Atas usul

dari kelompok Konservatif di negeri tersebut bahwa untuk menutup kekosongan kas negara dapat ditempuh dengan cara mengambil kekayaan alam sebanyak-banyaknya dari daerah jajahan yang laku di pasaran Eropa, salah satunya adalah rempah-rempah yang banyak dihasilkan di Indonesia. Kemudian Belanda menerapkan politik Cultuur Stelsel. Langkah-langkah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan politik tersebut, antara lain :

- a. Mengadakan perjanjian dengan penduduk agar mereka menyediakan lahan untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa
- b. Tanah yang ditanami tanaman perkebunan tidak lebih dari seperlima tanah milik penduduk
- b. Tanah yang ditanami tanaman perkebunan dibebaskan dari pajak
- c. Hasil tanaman harus diserahkan kepada pemerintah Belanda.
- d. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda.
- e. Mereka yang tidak memiliki tanah harus bekerja pada perkebunan milik Belanda.

Dalam pelaksanaannya Sistem Cultuur Stelsel banyak mengalami penyimpangan dari ketentuan di atas seperti : tidak adanya perjanjian terhadap para pemilik tanah. Lebih dari seperlima tanah penduduk yang dijadikan tanah perkebunan milik pemerintah kolonial. Tanah yang telah ditanami perkebunan milik pemerintah kolonial tetap dikenai pajak. Kegagalan panen tetap ditanggung sendiri oleh para petani. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dilakukan secara paksa kepada para penduduk, sehingga Cultuur sering disebut sistem tanam paksa.

Disamping melaksanakan Cultuur stelsel pada masa pemerintah Van den Bosch juga mengadakan pembaharuan, antara lain :

- a. Dibangunnya jalan raya dari Anyer (ujung barat p. Jawa) sampai Panarukan (ujung timur p. Jawa) sepanjang 100 km. Tujuan dibangunnya sarana di atas adalah untuk mempermudah pengangkutan hasil bumi dari Indonesia. Agar tidak banyak memakan biaya maka pembuatan jalan dan jembatan menggunakan tenaga penduduk pribumi dengan kerja paksa (rodi).

- b. Membangun pelabuhan di Banten , Semarang, Gresik, dan Tuban dan kota-kota strategis lainnya.

Namun dalam prakteknya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tanah yang diserahkan kepada pemerintah Belanda lebih dari seperlimanya. Petani bekerja di perkebunan pemerintah Belanda lebih dari 60 hari, dan petani masih harus membayar pajak pada tanah perkebunan yang dijadikan sebagai lahan perkebunan milik Belanda. Gubernur Jendral Van den Bosch memerintah dengan keras, sehingga penduduk di pulau Jawa banyak yang menderita bahkan mati kelaparan. Tidak ada lagi perlawanan terhadap penjajah Belanda. Karena tidak ada lagi pemimpin yang cakap dan tangguh. Karena pelaksanaan Cultuur stelsel banyak dilakukan dengan paksaan , maka sistem Cultuur Stelsel sering dinamakan sistem

Tanam Paksa . Dengan adanya Cultuur Stelsel menimbulkan dampak sebagai berikut :

- a. Rakyat pribumi yang kelaparan dan mengalami kematian karena hasil pertanian tidak memadai akibat sebagian besar lahan pertanian digunakan sebagai lahan perkebunan milik pemerintah. Negeri Belanda menjadi kaya raya terutama golongan Konservatif yang memegang pemerintahan
- b. Di negeri Belanda golongan Konservatif mendapat kritikan pedas dari golongan Liberal, agar pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pribumi . Golongan Liberal mengajukan pada pemerintah Belanda agar mau memperbaiki nasib bangsa Indonesia karena telah berjasa terhadap bangsa Belanda.

Pada tahun 1870-an Cultuur stelsel tidak lagi memberi keuntungan besar bagi Belanda karena banyaknya lahan perkebunan milik pemerintah yang dirusak dan dibakar oleh penduduk pribumi. Oleh karena itu pemerintah menyetujui usul Golongan Liberal agar Cultuur stelsel dihentikan dan diubah menjadi Politik pintu terbuka yaitu Belanda memberikan kesempatan kepada pengusaha asing di Eropa untuk menanamkan usahanya di Indonesia.

Pada tahun 1880 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Koeli Ordonantie, yaitu Undang Undang yang mengatur hubungan kerja antara kaum buruh dengan pengusaha yang menguntungkan pengusaha asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian diterapkan Poenali Sanctie (sangsi berat yang dikenakan pada para pekerja yang melarikan diri dari tempat kerjanya).

Tokoh liberal yang menentang sistem tanam paksa adalah Van der Pute, Edward Douwes Dekker, dan Baron van Houvel.

F. Politik Etis (1900 - 1942)

Dinamakan Politik Etis (politik Balas Budi) karena untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia yang sangat menderita akibat adanya sistem tanam pakas. Dipelopori oleh Van de Venter terdiri dari 3 kebijakan, antara lain : Edukasi (pendidikan), Irigasi (pengairan), dan Emigrasi (transmigrasi) ke luar Jawa, terutama Sumatera. Dalam pelaksanaannya ternyata menyimpang dari tujuan kebijakan tersebut.

Sekolah-sekolah didirikan di Indonesia hanya menampung orang-orang keturunan Belanda dan golongan priyayi saja. Adapun masyarakat umum hanya sampai kelas 3 SR (Sekolah Rakyat). Sekedar untuk bisa membaca dan menulis, sehingga dapat membantu pekerjaan administrasi pemerintah. Pengairan dibangun bukan untuk mengairi sawah-sawah petani, melainkan untuk mengairi perkebunan-perkebunan milik pemerintah Hindia Belanda. Transmigrasi pun hanya untuk mencukupi kebutuhan pengusaha asing yang membuka usahanya di Sumatera. Adapun upah kaum transmigran sangat kecil, sehingga kaum transmigran menjadi sangat menderita. Politik pintu

terbuka dan politik Etis ternyata belum mampu memperbaiki nasib bangsa Indonesia, karena dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang Belanda di Indonesia.

Pengaruh Politik Etis bagi bangsa Indonesia :

- a. Bangsa Indonesia mulai mengenal membaca dan menulis
- b. Munculnya kaum terpelajar dari kalangan priyayi yang akan menjadi motor pelopor pergerakan nasional di Indonesia .
- b. Dengan adanya Irigasi bangsa Indonesia mulai mengenal sistem pertanian modern
- c. Penyebaran penduduk ke Sumatera dapat mengurangi kepadatan penduduk di pulau Jawa.

G. Evaluasi

Soal Latihan

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan memilih jawaban yang benar !

1. Berikut merupakan alasan utama/sebab khusus bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera, yaitu...
 - a. melaksanakan politik imperialisme kuno yaitu 3G
 - b. jatuhnya konstantinopel ke tangan kesultanan Turki Usmani
 - c. bangsa Barat ingin mencari dunia baru yang lebih luas
 - d. membuktikan teori heliosentris bahwa bumi mengelilingi matahari
 - e. ingin mendapatkan rempah-rempah dengan harga murah
2. Jatuhnya Konstantinopel pada 1453 merupakan faktor kolonialisme-imperialisme Barat.
 - a. tambahan
 - b. penghambat
 - c. pendorong
 - d. pencetus
 - e. utama
3. Bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia di pimpin oleh
 - a. Jacob van Neck
 - b. Huygen van Lischoten
 - c. Cornelis de Houtman
 - d. Cornelis Spellman
 - e. Jaan Pieterzoon Coen
4. Motivasi kedatangan bangsa Eropa ke dunia Timur dapat diungkapkan melalui slogan...
 - a. Vini, vidi, Vici
 - b. Liberte, egalite, franternite
 - c. Gold, glory, gospel
 - d. Kolonialisme, imperialisme, merkantilisme

- e. Liberalisme
5. Negara pelopor penjelajahan samudera yang diprakarsai oleh Paus dalam perjanjian Thordesillas adalah...
 - a. Inggris dan Spanyol
 - b. Portugis dan Inggris
 - c. Spanyol dan Belanda
 - d. Spanyol dan Portugis
 - e. Portugis dan Belanda
 6. Berikut ini latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia, kecuali....
 - a. Renaissance
 - b. Gold
 - c. Glory
 - d. Gospel
 - e. Ingin melihat daerah lain
 7. Pada awalnya rakyat Ternate dapat menerima kedatangan bangsa Portugis, mengapa hal itu dapat terjadi?
 - a. Portugis bersikap ramah
 - b. Portugis merupakan pembeli rempah-rempah dengan harga tinggi
 - c. Portugis bekerja sama dengan Sultan Hairu
 - d. Portugis tidak mengganggu kehidupan agama
 - e. Portugis tidak melakukan tindak kekerasan
 8. Bangsa Portugis pertama kali sampai di Maluku pada tahun 1512 di bawah pimpinan....
 - a. Magelheans
 - b. Columbus
 - c. Alfonso d Albuquerque
 - d. Yuan Sabastian Del cano
 - e. Thomas Raffles
 9. Pada tahun 1512 Portugis dan kerajaan Sunda menyetujui perjanjiansehingga Portugis diberi izin mendirikan benteng dan gudang di Sunda Kelapa
 - a. Prasasti Perjanjian Sunda Portugal
 - b. Prasasti Kedukan Bukit
 - c. Prasasti Sunda Kelapa
 - d. Prasasti Tegal Arum
 - e. Prasasti Trunujoyo
 10. Portugis meninggalkan Maluku karena....
 - a. Bekerjasama dengan rakyat
 - b. Melakukan monopoli perdagangan
 - c. Membunuh rakyat

- d. Menguasai maluku
 - e. Ingin mencari daerah lain
11. Pada tahun 1570-1575 Portugis menghadapi peperangan dari Raja ... yang membuatnya terusir dari Ternate
- a. Sultan Ageng Tirtayasa
 - b. Sultan Mahmud Syah
 - c. Sultan Iskandar Muda
 - d. Sultan Ba,abullah
 - e. Sultan Hamid II
12. Kedatangan Spanyol ke Maluku menimbulkan konflik dengan Portugis. Konflik tersebut dapat diatasi dengan perjanjian Saragosa, yang isinya antara lain....
- a. Portugis berdagang di wilayah Maluku Utara dan Spanyol di Maluku Selatan
 - b. keduanya membangun serikat dagang bersama dan menerapkan sistem bagi hasil
 - c. Spanyol meninggalkan Maluku
 - d. Spanyol hanya diperbolehkan menyebarkan agama Kristen
 - e. daerah monopoli bangsa Portugis di Maluku dibatasi
13. Setelah Portugis, Belanda akhirnya masuk ke Indonesia. Masuknya Belanda ke Nusantara terjadi berkat....
- a. melemahnya kekuasaan Portugis di Indonesia
 - b. informasi dari penjelajah dan Kartografer Belanda
 - c. bantuan informasi dari pemerintah Portugis
 - d. hasil ekspedisi pertama Cornelis de Houtman
 - e. hasil sebuah penjelajahan yang tidak disengaja
14. Ekspedisi ke dua Belanda di bawah pimpinan J.C van Neck disambut baik oleh Sultan Banten karena alasan....
- a. ekonomis
 - b. politis
 - c. kultural
 - d. sosial
 - e. persahabatan
15. Pertama kali kantor perdagangan VOC didirikan di
- a. Aceh
 - b. Makasar
 - c. Batavia
 - d. Ambon
 - e. Maluku

16. Pendirian kota Batavia, yang akhirnya menjadi pusat pemerintahan VOC untuk seluruh kegiatan perdagangan di wilayah Hindia Timur, dilakukan oleh Gubernur Jendral...
- a. Pieter Both
 - b. Cornelis de Houtman
 - c. Jan Pieterszoon Coen
 - d. Jacob van Neck
 - e. H.W Daendels
17. Pemerintah Belanda memberikan hak-hak istimewa kepada VOC yang membuat VOC layaknya sebuah negara. Hak-hak istimewa tersebut disebut juga....
- a. Konsultasi
 - b. Sewa tanah
 - c. Ekstirpasi
 - d. oktroi
 - e. privilese
18. Kebijakan VOC menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan sehingga harga tetap dapat dipertahankan lazim disebut kebijakan...
- a. Monopoli
 - b. Pelayaran hongkong
 - c. Ekstirpasi
 - d. retribusi
 - e. afirmatif
19. Jenis tanaman yang menjadi fokus van den Bosch dalam sistem Tanam Paksa adalah....
- a. tanaman rempah-rempah
 - b. tanaman dengan masa tanam yang singkat
 - c. tanaman yang paling kuat dari serangan hama
 - d. tanaman keras
 - e. tanaman ekspor
20. VOC sempat memberikan keuntungan besar bagi kongsi dagang Belanda, namun dibubarkan pemerintah karena...
- a. organisasinya tidak memiliki struktur yang jelas
 - b. banyak pegawainya menerapkan kebijakan sendiri-sendiri
 - c. banyak pegawainya melakukan korupsi
 - d. permintaan rempah-rempah di Eropa menurun akibat perang
 - e. banyak uang dikeluarkan untuk membangun benteng
21. Pasca VOC, Perancis yang menguasai Belanda mengutus Herman Willem Deandels sebagai Gubernur Jendral yang baru. Tugas Utama Deandels adalah...
- a. Mempertahankan pulau Jawa dari serbuan Inggris
 - b. Mendirikan pusat latihan militer
 - c. Membangun berbagai pabrik senjata
 - d. Membuka rumah sakit dan benteng di bagian utara pulau Jawa
 - e. Membangun jalan raya pos yang membentang dari Anyer-Panarukan

22. Tujuan utama tanam paksa dibawah Gubernur Jendral Johannes van den Bosch adalah...
- Menyelamatkan negara Belanda dari kebangkrutan ekonomi
 - Memenuhi permintaan eksport elain cengkeh
 - Membiayai perang yang terjadi di Indonesia
 - Membiasakan petani Indonesia untuk menanam tanaman ekspor
 - Membiayai perang melawan Perancis
23. Penyebab utama terjadinya penyelewengan terhadap pelaksanaan aturan tanam paksa adalah ...kecuali
- Adanya cultuur procenten yang diberlakukan pemerintah Belanda
 - Adanya penjualan tanah-tanah partikelir oleh pemerintah Belanda
 - Adanya monopoli dagang oleh Belanda
 - Adanya Poenale sanctie yang dilakukan penguasa Belanda
 - adanya pedagang-pedagang Belanda yang korup
24. Sejak dihapuskannya sistem ekonomi terbuka , pemerintah memberlakukan politik baru yang dikenal dengan ...
- Politik ekonomi liberal
 - Politik tanam paksa
 - Politik balas budi
 - Politik sosialis
 - politik komunis
25. Di masa pemerintahan Raffles, sistem pajak tanah sangat merugikan para bupati karena....
- Diharuskan menyewakan tanah pada pemerintah
 - Tidak lagi punya wewenang menarik pajak
 - Harta benda mereka disita menjadi milik pemerintah
 - Dilarang membela kepentingan rakyat kecil
 - Diawasi oleh Inggris

Essai

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas!

- Jelaskan hubungan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Dinasti Ottoman dengan lahirnya era kolonialisme dan imperialisme.
- Apa yang dimaksud dengan paham merkantalisme? Jelaskan.
- Jelaskan kebijakn-kebijakan J.P.Coen di Maluku.
- Apa yang dimaksud dengan kebijakn ekstirpasi serta kaitan antara kebijakan ini dan Pelayaran Hongi.
- Jelaskan bagaimana praktik korupsi menjadi salah satu alasan utama bangkrut dan bubarnya VOC pada tahun 1799. Selanjutnya, dalam hal apa praktik korupsi itu berhubungan dengan praktik korupsi yang terjadi di Indonesia pada masa sekarang ini?

6. Apa yang dimaksud dari sebutan “ Gubernur Jendral Belanda-Perancis “ bagi H.W .Deandels? jelaskan.
7. Jelaskan semangat antifeodalisme serta kondisi sosial-politik Eropa serta latar belakang kehidupan H.W.Deandels sendiri.
8. Jelaskan dampak positif dari politik etis bagi rakyat Indonesia?
9. Jelaskan kebijakan yang diambil oleh Raffles selama menjadi Gubernur Jendral.
10. Jelaskan isi Kapitulasi Tuntang.

BAB II

Dampak Penjajahan Bangsa Eropa di Indonesia

A. Bidang Politik

Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan-kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial, lewat *divide et impera* (politik adu domba). Melalui *divide et impera*, pemerintah kolonial Belanda berhasil memengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya.

Berhasil membuat penguasa daerah tunduk, berarti juga dapat “mengatur” beberapa kebijakan baru, seperti:

1. membagi wilayah Hindia Belanda khususnya Jawa menjadi 9 prefektur dan 30 *regentschap*.
2. Tiap prefektur dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa sedangkan tiap *regentschap* (kabupaten) dipimpin bupati yang berasal dari orang pribumi bangsawan.
3. Prefektur dan regent berada di bawah Gubernur Jenderal yang berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi pemerintah kolonial Belanda.
4. Gubernur Jenderal dibantu oleh enam departemen yaitu kehakiman, keuangan, dalam negeri, kebudayaan dan kepercayaan, ekonomi serta kesejahteraan rakyat.
5. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik *Pax Nederlanica* di akhir abad 19 menuju awal abad 20.

Pax Nederlanica adalah perubahan sistem pemerintahan dari administrasi tradisional ke sistem administrasi modern. Sistem ini diterapkan untuk menggantikan posisi penting pemerintah daerah ke tangan pemerintah Belanda dengan cara mengangkat dan menggaji pegawai yang menduduki jabatan struktur birokrasi. Dalam sistem tersebut jabatan tertinggi yang bisa dipegang oleh masyarakat pribumi adalah bupati dan di bawahnya terdapat wedana dan patih.

Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran *Trias Politica* yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam badan yudikatif di struktur tersebut, pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi tiga macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia-Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan orang Timur Asing, dan peradilan orang pribumi. Dalam badan legislatif, pemerintah kolonial Belanda membentuk *Volksraad* atau Dewan Rakyat pada tahun 1918.

B. Bidang Budaya

Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara memengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur hingga cara berpikir.

Selain itu, kedatangan Bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya, kita jadi tahu berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa. Selain itu, ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut punya ciri khas yang sulit dibuat saat ini. Seperti bangunan yang bisa kita temui di Kota Tua, Jakarta. Dulunya, Kota Tua merupakan pusat pemerintahan Batavia.

Gaya arsitektur pada bangunan zaman belanda menjadi dampak kedatangan Bangsa Eropa yang masih bisa kamu nikmati di masa kini.

Bangsa Eropa, terutama Belanda, juga banyak mendirikan benteng-benteng untuk menghalau serangan dari Inggris. Kamu bisa lihat benteng Fort de Kock di Bukittinggi, di Sumatera Barat, Benteng Marlborough di Bengkulu, Benteng Spellwijk di Banten, Benteng Vredeburg di Yogyakarta, dan lain-lain.

C. Bidang Sosial

Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G memengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia.

Salah satu penyebar agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Fransiscus Xaverius, seorang misionaris dari Portugis, di Maluku pada tahun 1546-1547. Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga turut tersebar di Indonesia.

Penyebaran agama Kristen Protestan mulai terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jendral Raffles. Penyebaran agama ini dilakukan oleh Nederlands Zendeling Genootschap (NZG), yaitu organisasi yang menyebarkan agama Kristen Protestan berdasarkan Alkitab. Beberapa tokoh yang tergabung dalam NZG yang terkenal adalah Ludwig Ingwer Nommensen dan Sebastian Qanckaarts.

D. Bidang Ekonomi

Dengan datangnya Bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Raffles menjalankan kebijakan Sistem Sewa Tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia-Belanda. Salah satunya adalah de Javasche Bank, bank modern di Hindia-Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828.

Selanjutnya adalah bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan jalan raya pos Anyer-Panarukan. Keberadaan infrastruktur jalan didukung oleh jaringan transportasi khususnya kereta api yang muncul dan berkembang pada masa Sistem Tanam Paksa. Jaringan kereta api muncul dan berkembang di Hindia-Belanda sebagai sarana pengantaran hasil perkebunan yang ada di Hindia Belanda serta transportasi masyarakat. Munculnya sistem transportasi ini merupakan dampak kedatangan Bangsa Eropa bagi Indonesia yang masih bisa kamu gunakan hingga hari ini.

E. Bidang Pendidikan

Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Kristen Katolik. Kala itu dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran agama Katolik untuk para pribumi dari daerah Timur Indonesia di sekitar daerah Maluku.

Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan Politik Etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan.

Pendidikan selanjutnya yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda adalah sekolah-sekolah kejuruan seperti sekolah calon pegawai negeri sipil yaitu OSVIA (Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren). Ada pula dua sekolah kejuruan medis selevel dengan tingkat universitas yaitu School Tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA), dan Nederland Indische Artssenschool (NIAS). STOVIA didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda untuk melahirkan dokter-dokter demi mengatasi berbagai penyakit berbahaya di wilayah jajahannya. Sekolah ini didirikan untuk mendidik masyarakat pribumi, sehingga setelah mengenyam pendidikan di STOVIA mereka mendapat gelar "Dokter Jawa".

Kemudian muncul kembali pendidikan tingkat universitas Technische Hoogeschool (THS, Sekolah Tinggi Teknik). Melalui sekolah-sekolah bergaya pendidikan barat yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda nantinya melahirkan golongan elite baru dalam masyarakat Indonesia. Golongan elite baru inilah yang membawa perubahan dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan.

E. Evaluasi

Jawablah soal berikut dengan jelas dan lengkap !

1. Jelaskan dampak penjajahan Belanda dalam bidang politik dan berikan contoh yang masih dapat ditemui pada saat sekarang ini?
2. Korupsi sampai saat ini masih terjadi di Indonesia, berikan pendapatmu apakah korupsi merupakan warisan dampak penjajahan Belanda?
3. Apasaja dampak penjajahan Belanda dalam bidang pendidikan? Berikan pendapatmu bagian manakah dari dampak penjajahan Belanda dalam bidang pendidikan yang masih ada sampai sekarang?
4. Apasaja dampak penjajahan Portugis terutama pada bidang kesenian dan sosial?
5. Mengapa di Indonesia bagian Timur dominan bangsa Indonesia beragama Nasrani? Adakah hubungannya dengan penjajahan bangsa Eropa? Berikan ulasanmu!

BAB III

Organisasi Pergerakan Nasional

A. Faktor Pendorong Lahirnya Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia

Munculnya semangat kebangsaan yang ada pada masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor dari dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstern). Faktor ekstern yang mempengaruhi nasionalisme Indonesia adalah: (1) pengaruh paham-paham modern dari Eropa (liberalisme, humanisme, nasionalisme, komunisme); (2) pengaruh gerakan Pan-Islamisme; (3) Pengaruh pergerakan bangsa terjajah di Asia; dan (4) Pengaruh kemenangan Jepang atas Rusia.

Sedangkan faktor Intern yang mendorong munculnya semangat kebangsaan atau nasionalisme adalah: (1) timbulnya kembali golongan pertengahan, kaum terpelajar; (2) adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh rakyat dalam berbagai bidang kehidupan; (3) pengaruh golongan peranakan; dan (4) adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme.

Faktor pendorong munculnya pergerakan nasional di Indonesia | faktor Intern dan Ekstern. Berikut penjelasan mengenai faktor Intern dan Ekstern munculnya pergerakan nasional di Indonesia.

a. Faktor Ekstern

1. Munculnya kesadaran tentang pentingnya semangat kebangsaan, semangat nasional, perasaan senasib sebagai bangsa terjajah, serta keinginan untuk mendirikan negara berdaulat lepas dari cengkeraman imperialisme di seluruh negara-negara jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika latin pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

2. Fase tumbuhnya anti imperialisme berkembang bersamaan dengan atau dipengaruhi oleh lahirnya golongan terpelajar yang memperoleh pengalaman pergaulan internasional serta mendapatkan pemahaman tentang ide-ide baru dalam kehidupan bernegara yang lahir di Eropa, seperti demokrasi, liberalisme, dan komunisme melalui pendidikan formal dari negara-negara barat.

3. Paham-paham tersebut pada dasarnya mengajarkan tentang betapa pentingnya persamaan derajat semua warga negara tanpa membedakan warna kulit, asal usul keturunan, dan perbedaan keyakinan agama. Paham tersebut masuk ke Indonesia dan dibawa oleh tokoh-tokoh Belanda yang berpandangan maju, golongan terpelajar Indonesia yang memperoleh pendidikan Barat, serta alim ulama yang menunaikan ibadah haji dan memiliki pergaulan dengan sesama umat muslim seluruh dunia.

4. Perang dunia I (1914-1919) telah menyadarkan bangsa-bangsa terjajah bahwa negara-negara imperialis telah berperang diantara mereka sendiri. Perang tersebut merupakan perang memperebutkan daerah jajahan. Tokoh-tokoh pergerakan nasional di Asia, Afrika dan Amerika Latin telah menyadari bahwa kini saatnya telah tiba bagi mereka untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah yang sudah lelah berperang.

5. Munculnya rumusan damai mengenai penentuan nasib sendiri (self determination) presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson pasca perang dunia I disambut tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia sebagai pijakan dalam perjuangan mewujudkan kemerdekaan.

6. Lahirnya komunisme melalui Revolusi Rusia 1917 yang diikuti dengan semangat anti kapitalisme dan imperialisme telah mempengaruhi timbulnya ideologi perlawanan di negara-negara jajahan terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat. Konflik ideologi dunia antara kapitalisme atau imperialisme sosialisme atau komunisme telah memberikan dorongan bagi bangsa-bangsa terjajah untuk melawan kapitalisme atau imperialisme Barat.

7. Munculnya nasionalisme di Asia dan di negara-negara jajahan lainnya di seluruh dunia telah mengilhami tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Kemenangan Jepang atas Rusia 1905 telah memberkat keyakinan bagi tokoh nasionalis Indonesia bahwa bangsa kulit putih Eropa dapat dikalahkan oleh kulit berwarna Asia. Demikian juga, model pergerakan nasional yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi di India, Mustafa Kemal Pasha di Turki, serta Dr. Sun Yat Sen di Cina telah memberikan inspirasi bagi kalangan terpelajar nasionalis Indonesia bahwa imperialisme Belanda dapat dilawan melalui organisasi modern dengan cara memajukan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan politik pada bangsa Indonesia terlebih dahulu sebelum memperjuangkan kemerdekaan.

b. Faktor Intern

1. Penjajahan mengakibatkan terjadinya penderitaan rakyat Indonesia yang tidak terkira. Sistem penjajahan Belanda yang eksploitatif terhadap sumber daya alam dan manusia Indonesia serta sewenang-wenang terhadap warga pribumi telah menyadarkan penduduk Indonesia tentang adanya sistem kolonialisme Imperialisme Barat yang menerapkan ketidaksamaan dan perlakuan membedakan (diskriminatif).

2. Kenangan akan kejayaan masa lalu. Rakyat Indonesia pada umumnya menyadari bahwa mereka pernah memiliki negara kekuasaan yang jaya dan berdaulat di masa lalu (Sriwijaya dan Majapahit). Kejayaan ini menimbulkan kebanggaan dan meningkatnya harga diri suatu bangsa, oleh karena itu rakyat

Indonesia berusaha untuk mengembalikan kebanggaan dan harga diri sebagai suatu bangsa tersebut.

3. Lahirnya kelompok terpelajar yang memperoleh pendidikan Barat dan Islam dari luar negeri . kesempatan ini terbuka setelah pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 menjalankan politik Etis (edukasi, imigrasi, dan irigasi). Orang-orang Indonesia yang memperoleh pendidikan barat berasal dari kalangan priayi abangan yang memiliki status bangsawan. Sebagian lainnya berasal dari kalangan priayi dan santri yang secara sosial ekonomi memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji serta memperoleh pendidikan tertentu diluar negeri.

4. Lahirnya kelompok terpelajar islam telah menyadarkan bangsa Indonesia terjajah yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Kelompok intelektual Islam telah menjadi agent of change atau agen pengubah cara pandang masyarakat bahwa nasib bangsa Indonesia yang terjajah tersebut tidak dapat diperbaiki melalui belas kasihan penjajah seperti Politik Etis misalnya. Nasib bangsa Indonesia harus diubah oleh bangsa Indonesia sendiri dengan cara memberdayakan bangsa melalui peningkatan taraf hidup di bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya.

5. Menyebarnya paham-paham baru yang lahir di Eropa, seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan komunisme di negeri jajahan (Indonesia) yang dilakukan oleh kalangan terpelajar.

6. Muncul dan berkembangnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia dan berkembang menjadi gerakan politik yang sifatnya nasional. Tindakan pemerintah kolonial yang sifatnya semakin represif seperti pembuangan para pemimpin Indische Partij pada 1913, ikut campurnya Belanda dalam urusan internal Sarekat Islam, dan penangkapan tokoh-tokoh nasionalis telah menimbulkan gerakan nasional untuk memperoleh kebebasan berbicara, berpolitik, serta menentukan nasib sendiri tanpa dicampuri pemerintah kolonial Belanda

Perbedaan Perjuangan Sebelum dan Sesudah Tahun 1908

Sebelum tahun 1908	Sesudah tahun 1908
Kurang adanya persatuan/Bersifat kedaerahan	Perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia mulai menonjolkan persatuan
Faktor persenjataan masih sangat sederhana/Perjuangan menggunakan senjata tradisional	Perjuangan yang dilakukan tidak lagi menggunakan senjata tradisional, melainkan menggunakan organisasi modern
Pemimpin perjuangan adalah pemimpin	Pemimpin perjuangan ialah golongan

daerah atau golongan bangsawan	cerdik pandai
--------------------------------	---------------

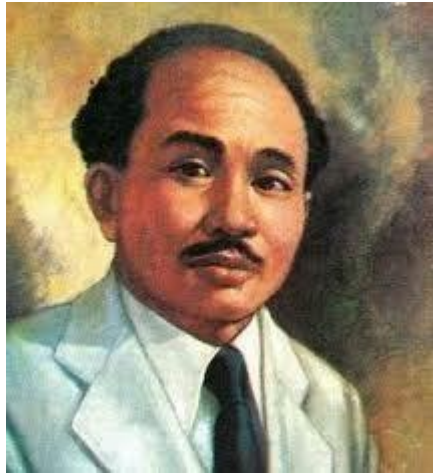
Karakteristik Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Kolonialisme Tahun 1908

1. Dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar
2. Bersifat nasional
3. Perjuangan menggunakan jalur organisasi
4. Memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi
5. Memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu Indonesia merdeka

B. Organisasi pergerakan indonesia

1. Budi Utomo

Organisasi Budi Utomo (BU) didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa STOVIA di Batavia dengan Sutomo sebagai ketuanya. Terbentuknya organisasi tersebut atas ide dr. Wahidin Sudirohusodo yang sebelumnya telah berkeliling Jawa untuk menawarkan idenya membentuk Studiefonds.



Gagasan Studiefonds bertujuan untuk menghimpun dana guna memberikan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi, namun tidak mampu melanjutkan studinya. Gagasan itu tidak terwujud, tetapi gagasan itu melahirkan Budi Utomo. Tujuan Budi Utomo adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan.

Tujuan tersebut ingin dicapai dengan usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) memajukan pengajaran;
- 2) memajukan pertanian, peternakan dan perdagangan;
- 3) memajukan teknik dan industri
- 4) menghidupkan kembali kebudayaan.

Dr Sutomo

Dilihat dari tujuannya, Budi Utomo bukan merupakan organisasi politik melainkan merupakan organisasi pelajar dengan pelajar STOVIA sebagai intinya. Sampai menjelang kongresnya yang pertama di Yogyakarta telah berdiri tujuh cabang Budi Utomo, yakni di Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo.

Untuk mengonsolidasi diri (dengan dihadiri 7 cabangnya), Budi Utomo mengadakan kongres yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober 1908. Kongres memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Budi Utomo tidak ikut dalam mengadakan kegiatan politik.
2. Kegiatan Budi Utomo terutama ditujukan pada bidang pendidikan dan kebudayaan.
3. Ruang gerak Budi Utomo terbatas pada daerah Jawa dan Madura.
4. Memilih R.T. Tirtokusumo, Bupati Karanganyar sebagai ketua.
5. Yogyakarta ditetapkan sebagai pusat organisasi.

Sampai dengan akhir tahun 1909, telah berdiri 40 cabang Budi Utomo dengan jumlah anggota mencapai 10.000 orang. Akan tetapi, dengan adanya kongres tersebut tampaknya terjadi pergeseran pimpinan dari generasi muda ke generasi tua. Banyak anggota muda yang menyingkir dari barisan depan, dan anggota Budi

Utomo kebanyakan dari golongan priayi dan pegawai negeri. Dengan demikian, sifat protonasionalisme dari para pemimpin yang tampak pada awal berdirinya Budi Utomo terdesak ke belakang. Strategi perjuangan BU pada dasarnya bersifat kooperatif.

Mulai tahun 1912 dengan tampilnya Notodirjo sebagai ketua menggantikan R.T. Notokusumo, Budi Utomo ingin mengejar ketinggalannya. Akan tetapi, hasilnya tidak begitu besar karena pada saat itu telah muncul organisasi-organisasi nasional lainnya, seperti Sarekat Islam (SI) dan Indische Partij (IP).

Namun demikian, Budi Utomo tetap mempunyai andil dan jasa yang besar dalam sejarah pergerakan nasional, yakni telah membuka jalan dan memelopori gerakan kebangsaan Indonesia. Itulah sebabnya tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati setiap tahun hingga sekarang.

2. Sarekat Islam (SI)



H Samanhudi

Tiga tahun setelah berdirinya Budi Utomo, yakni tahun 1911 berdirilah Sarekat Dagang Islam (SDI) di Solo oleh H. Samanhudi, seorang pedagang batik dari Laweyan Solo.

Organisasi Sarekat Dagang Islam berdasar pada dua hal berikut ini.

- a. Agama Islam.
- b. Ekonomi, yakni untuk memperkuat diri dari pedagang Cina yang berperan sebagai leveransir (seperti kain putih, malam, dan sebagainya).

Atas prakarsa H.O.S. Cokroaminoto, nama Sarekat Dagang Islam kemudian diubah menjadi Sarekat Islam (SI), dengan tujuan untuk memperluas anggota sehingga tidak hanya terbatas pada pedagang saja.

Berdasarkan Akte Notaris pada tanggal 10 September 1912, ditetapkan Tujuan Sarekat Islam sebagai berikut:

1. memajukan perdagangan
2. membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha (permodalan)
3. memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli
4. memajukan kehidupan agama Islam.

Melihat tujuannya tidak tampak adanya kegiatan politik. Akan tetapi, Sarekat Islam dengan gigih selalu memperjuangkan keadilan dan kebenaran terhadap penindasan dan pemerasan oleh pemerintah kolonial. Dengan demikian, di samping tujuan ekonomi juga ditekankan adanya saling membantu di antara anggota. Itulah sebabnya dalam waktu singkat, Sarekat Islam berkembang menjadi anggota massa yang pertama di Indonesia. Sarekat Islam merupakan gerakan nasionalis, demokratis dan ekonomis, serta berasaskan Islam dengan haluan kooperatif.

Mengingat perkembangan Sarekat Islam yang begitu pesat maka timbullah kekhawatiran dari pihak Gubernur Jenderal Indenberg sehingga permohonan Sarekat Islam sebagai organisasi nasional yang berbadan hukum ditolak dan hanya diperbolehkan berdiri secara lokal. Pada tahun 1914 telah berdiri 56 Sarekat Islam lokal yang diakui sebagai badan hukum.

Pada tahun 1915 berdirilah Central Sarekat Islam (CSI) yang berkedudukan di Surabaya. Tugasnya ialah membantu menuju kemajuan dan kerjasama antar Sarekat Islam lokal. Pada tanggal 17–24 Juni 1916 diadakan Kongres SI Nasional Pertama di Bandung yang dihadiri oleh 80 Sarekat Islam lokal dengan anggota 360.000 orang anggota. Dalam kongres tersebut telah disepakati istilah "nasional", dimaksudkan bahwa Sarekat Islam menghendaki persatuan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia menjadi satu bangsa.

Sifat Sarekat Islam yang demokratis dan berani serta berjuang terhadap kapitalisme untuk kepentingan rakyat kecil sangat menarik perhatian kaum sosialis kiri yang tergabung dalam Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV) pimpinan Sneevliet (Belanda), Semaun, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin (Indonesia).

Itulah sebabnya dalam perkembangannya Sarekat Islam pecah menjadi dua kelompok berikut ini.

- 1) Kelompok nasionalis religius (nasionalis keagamaan) yang dikenal dengan Sarekat Islam Putih dengan asas perjuangan Islam di bawah pimpinan H.O.S. Cokroaminoto.
- 2) Kelompok ekonomi dogmatis yang dikenal dengan nama Sarekat Islam Merah dengan haluan sosialis kiri di bawah pimpinan Semaun dan Darsono.

3. Indische Partij (IP)



Indische Partij (IP) didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Tiga Serangkai, yakni Douwes Dekker (Setyabudi Danudirjo), dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara).

Organisasi ini mempunyai cita-cita untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli

maupun golongan Indo, Cina, Arab, dan sebagainya. Mereka akan dipadukan dalam kesatuan

Douwes Dekker

bangsa dengan membutuhkan semangat nasionalisme Indonesia. Cita-cita Indische Partij banyak disebar-luaskan melalui surat kabar De Expres. Di samping itu juga disusun program kerja sebagai berikut:

1. meresapkan cita-cita nasional Hindia (Indonesia).
2. memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintahan, maupun kemasyarakatan.
3. memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan yang lain.
4. memperbesar pengaruh pro-Hindia di lapangan pemerintahan.
5. berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia.
6. dalam hal pengajaran, kegunaannya harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat mereka yang ekonominya lemah.

Melihat tujuan dan cara-cara mencapai tujuan seperti tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa Indische Partij berdiri di atas nasionalisme yang luas menuju Indonesia merdeka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indische Partij merupakan partai politik pertama di Indonesia dengan haluan kooperasi. Dalam waktu yang singkat telah mempunyai 30 cabang dengan anggota lebih kurang 7.000 orang yang kebanyakan orang Indo.

Oleh karena sifatnya yang progresif menyatakan diri sebagai partai politik dengan tujuan yang tegas, yakni Indonesia merdeka sehingga pemerintah menolak untuk memberikan badan hukum dengan alasan Indische Partij bersifat politik dan hendak mengancam ketertiban umum. Walaupun demikian, para pemimpin Indische Partij masih terus mengadakan propaganda untuk menyebarkan gagasan-gagasannya.

Satu hal yang sangat menusuk perasaan pemerintah Hindia Belanda adalah tulisan Suwardi Suryaningrat yang berjudul *Als ik een Nederlander was* (seandainya saya seorang Belanda) yang isinya berupa sindiran terhadap ketidakadilan di daerah jajahan. Oleh karena kegiatannya sangat mencemaskan pemerintah Belanda maka pada bulan Agustus 1913 ketiga pemimpin Indische Partij dijatuhi hukuman pengasingan dan mereka memilih Negeri Belanda sebagai tempat pengasingannya.

Dengan diasingkannya ketiga pemimpin Indische Partij maka kegiatan Indische Partij makin menurun. Selanjutnya, Indische Partij berganti nama menjadi Partai Insulinde dan pada tahun 1919 berubah lagi menjadi National Indische Partij (NIP). National Indische Partij tidak pernah mempunyai pengaruh yang besar di

kalangan rakyat dan akhirnya hanya merupakan perkumpulan orang-orang terpelajar.

4. Muhammadiyah



Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan Indonesia, sifatnya nonpolitik. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial menuju kepada tercapainya kebahagiaan lahir batin.

Tujuan Muhammadiyah ialah sebagai berikut.

1. memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam;

KH Ahmad Dahlan

2. mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam.

Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

1. mendirikan sekolah-sekolah yang berdasarkan agama Islam (dari TK sampai dengan perguruan tinggi);
2. mendirikan poliklinik-poliklinik, rumah sakit, rumah yatim, dan masjid;
3. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Muhammadiyah berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Itulah sebabnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agama Islam secara modern dan memperteguh keyakinan tentang agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Kegiatan Muhammadiyah juga telah memperhatikan pendidikan wanita yang dinamakan Aisyiah, sedangkan untuk kepanduan disebut Hizbut Wathon (HW).

Sejak berdiri di Yogyakarta (1912) Muhammadiyah terus mengalami perkembangan yang pesat. Sampai tahun 1913, Muhammadiyah telah memiliki 267 cabang yang tersebar di Pulau Jawa. Pada tahun 1935, Muhammadiyah sudah mempunyai 710 cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

5. Gerakan Pemuda

Gerakan pemuda Indonesia, sebenarnya telah dimulai sejak berdirinya Budi Utomo, namun sejak kongresnya yang pertama perannya telah diambil oleh golongan tua (kaum priayi dan pegawai negeri) sehingga para pemuda kecewa dan keluar dari organisasi tersebut. Baru beberapa tahun kemudian, tepatnya pada

tanggal 7 Maret 1915 di Batavia berdiri **Trikoro Dharmo** oleh R. Satiman Wiryosanjoyo, Kadarman, dan Sunardi. Trikoro Dharmo yang diketui oleh R. Satiman Wiryosanjoyo merupakan organisasi pemuda yang pertama yang anggotanya terdiri atas para siswa sekolah menengah berasal dari Jawa dan Madura. Trikoro Dharmo, artinya tiga tujuan mulia, yakni sakti, budi, dan bakti. Tujuan perkumpulan ini adalah sebagai berikut:

1. mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi bumi putra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan;
2. menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya;
3. membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya.

Tujuan tersebut sebenarnya baru merupakan tujuan perantara. Adapun tujuan yang sebenarnya adalah seperti apa yang termuat dalam majalah Trikoro Dharmo yakni mencapai Jawa raya dengan jalan memperkokoh rasa persatuan antara pemuda-pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Oleh karena sifatnya yang masih Jawa sentris maka para pemuda di luar Jawa (tidak berbudaya Jawa) kurang senang.

Untuk menghindari perpecahan, pada kongresnya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918 namanya diubah menjadi Jong Java (Pemuda Jawa). Sesuai dengan anggaran dasarnya, Jong Java ini bertujuan untuk mendidik para anggotanya supaya kelak dapat menyumbangkan tenaganya untuk membangun Jawa raya dengan jalan mempererat persatuan, menambah pengetahuan, dan rasa cinta pada budaya sendiri.

Sejalan dengan munculnya Jong Java, pemuda-pemuda di daerah lain juga membentuk organisasi-organisasi, seperti Jong Sumatra Bond, Pasundan, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Selebes, Jong Batak, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, Timorees Verbond, dan lain-lain. Pada dasarnya semua organisasi itu masih bersifat kedaerahan, tetapi semuanya mempunyai cita-cita ke arah kemajuan Indonesia, khususnya memajukan budaya dan daerah masing-masing.

6. Taman Siswa



Ki Hajar Dewantara

Sekembalinya dari tanah pengasingannya di Negeri Belanda (1919), **Suwardi Suryaningrat** menfokuskan perjuangannya dalam bidang pendidikan. Pada tanggal 3 Juli 1922 Suwardi Suryaningrat (lebih dikenal dengan nama **Ki Hajar Dewantara**) berhasil mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta. Dengan berdirinya Taman Siswa, Suwardi Suryaningrat memulai gerakan baru

bukan lagi dalam bidang politik melainkan bidang pendidikan, yakni mendidik angkatan muda dengan jiwa kebangsaan Indonesia berdasarkan akar budaya bangsa.

Sekolah Taman Siswa dijadikan sarana untuk menyampaikan ideologi nasionalisme kebudayaan, perkembangan politik, dan juga digunakan untuk mendidik calon-calon pemimpin bangsa yang akan datang. Dalam hal ini, sekolah merupakan wahana untuk meningkatkan derajat bangsa melalui pengajaran itu sendiri. Selain pengajaran bahasa (baik bahasa asing maupun bahasa Indonesia), pendidikan Taman Siswa juga memberikan pelajaran sejarah, seni, sastra (terutama sastra Jawa dan wayang), agama, pendidikan jasmani, dan keterampilan (pekerjaan tangan) merupakan kegiatan utama perguruan Taman Siswa.

Pendidikan Taman Siswa dilakukan dengan sistem "among" dengan pola belajar "asah, asih dan asuh". Dalam hal ini diwajibkan bagi para guru untuk bersikap dan berlaku "sebagai pemimpin" yakni di depan memberi contoh, di tengah dapat memberikan motivasi, dan di belakang dapat memberikan pengawasan yang berpengaruh. Prinsip pengajaran inilah yang kemudian dikenal dengan pola kepemimpinan "Ing ngarsa sung tulodho, ing madya manguk karsa, tut wuri handayani ". Pola kepemimpinan ini sampai sekarang masih menjadi ciri kepemimpinan nasional.

Berkat jasa dan perjuangannya yakni mencerdaskan kehidupan menuju Indonesia merdeka maka tanggal 2 Mei (hari kelahiran Ki Hajar Dewantara) ditetapkan sebagai hari Pendidikan Nasional. Di samping itu, "Tut Wuri Handayani" sebagai semboyan terpatri dalam lambang Departemen Pendidikan Nasional.

7. Partai Komunis Indonesia (PKI)

Benih-benih paham Marxis dibawa masuk ke Indonesia oleh seorang Belanda yang bernama H.J.F.M. Sneevliet. Atas dasar Marxisme inilah kemudian pada tanggal 9 Mei 1914 di Semarang, Sneevliet bersama-sama dengan J.A. Brandsteder, H.W. Dekker, dan P. Bergsma berhasil mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV). Ternyata ISDV tidak dapat berkembang sehingga Sneevliet melakukan infiltrasi (penyusupan) kader-kadernya ke dalam tubuh SI dengan menjadikan anggota-anggota ISDV sebagai anggota SI, dan sebaliknya anggota-anggota SI menjadi anggota ISDV.

Dengan cara itu Sneevliet dan kawan-kawannya telah mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan SI, lebih-lebih setelah berhasil mengambil alih beberapa pemimpin SI, seperti Semaun dan Darsono. Mereka inilah yang dididik secara khusus untuk menjadi tokoh-tokoh Marxisme tulen. Akibatnya SI Cabang

Semarang yang sudah berada di bawah pengaruh ISDV semakin jelas warna Marxisnya dan selanjutnya terjadilah perpecahan dalam tubuh SI.

Pada tanggal 23 Mei 1923 ISDV diubah menjadi Partai Komunis Hindia dan selanjutnya pada bulan Desember 1920 menjadi Partai Komunis Indonesia. (PKI). Susunan pengurus PKI , antara lain Semaun (ketua), Darsono (wakil ketua), Bersgma (sekretaris), dan Dekker (bendahara).

PKI semakin aktif dalam percaturan politik dan untuk menarik massa maka dalam propagandanya PKI menghalalkan secara cara. Sampai-sampai tidak segan-segan untuk mempergunakan kepercayaan rakyat kepada ayat-ayat Al - Qur'an dan Hadis bahkan juga Ramalan Jayabaya dan Ratu Adil.

Kemajuan yang diperolehnya ternyata membuat PKI lupa diri sehingga merencanakan suatu petualangan politik. Pada tanggal 13 November 1926 PKI melancarkan pemberontakan di Batavia dan disusul di daerah-daerah lain, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatra Barat pemberontakan PKI dilancarkan pada tanggal 1 Januari 1927. Dalam waktu yang singkat semua pemberontakan PKI tersebut berhasil ditumpas. Akhirnya, ribuan rakyat ditangkap, dipenjara, dan dibuang ke Tanah Merah dan Digul Atas (Papua).

8. Partai Nasional Indonesia (PNI)

Algemene Studie Club di Bandung yang didirikan oleh Ir. Soekarno pada tahun 1925 telah mendorong para pemimpin lainnya untuk mendirikan partai politik, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 oleh 8 pemimpin, yakni dr. Cipto Mangunkusumo, Ir. Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Mr. Sunaryo, Mr. Budiarto, Dr. Samsi, dan Ir. Soekarno sebagai ketuanya. Kebanyakan dari mereka adalah mantan anggota Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda yang baru kembali ke tanah air.

Radikal PNI telah kelihatan sejak awal berdirinya. Hal ini terlihat dari anggaran dasarnya bahwa tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan strategi perjuangannya nonkooperasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka PNI berasaskan pada self help, yakni prinsip menolong diri sendiri, artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang telah rusak oleh penjajah dengan kekuatan sendiri; nonkooperatif, yakni tidak mengadakan kerja sama dengan pemerintah Belanda; Marhaenisme, yakni mengentaskan massa dari kemiskinan dan kesengsaraan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PNI telah menetapkan program kerja sebagaimana dijelaskan dalam kongresnya yang pertama di Surabaya pada tahun 1928, seperti berikut.

1. Usaha politik, yakni memperkuat rasa kebangsaan (nasionalisme) dan kesadaran atas persatuan bangsa Indonesia, memajukan pengetahuan sejarah kebangsaan, mempererat kerja sama dengan bangsa-bangsa Asia, dan menumpas segala rintangan bagi kemerdekaan diri dan kehidupan politik.
2. Usaha ekonomi, yakni memajukan perdagangan pribumi, kerajinan, serta mendirikan bank-bank dan koperasi.
3. Usaha sosial, yaitu memajukan pengajaran yang bersifat nasional, meningkatkan derajat kaum wanita, memerangi pengangguran, memajukan transmigrasi, memajukan kesehatan rakyat, antara lain dengan mendirikan poliklinik.

Untuk menyebarluaskan gagasannya, PNI melakukan propaganda-propaganda, baik lewat surat kabar, seperti Banteng Priangan di Bandung dan Persatuan Indonesia di Batavia, maupun lewat para pemimpin khususnya Ir. Soekarno sendiri. Dalam waktu singkat, PNI telah berkembang pesat sehingga menimbulkan kekawatiran di pihak pemerintah Belanda. Pemerintah kemudian memberikan peringatan kepada pemimpin PNI agar menahan diri dalam ucapan, propaganda, dan tindakannya.

Dengan munculnya isu bahwa PNI pada awal tahun 1930 akan mengadakan pemberontakan maka pada tanggal 29 Desember 1929, pemerintah Hindia Belanda mengadakan pengeledahan secara besar-besaran dan menangkap empat pemimpinnya, yaitu Ir. Soekarno, Maskun, Gatot Mangunprojo dan Supriadinata. Mereka kemudian diajukan ke pengadilan di Bandung.

Dalam sidang pengadilan, Ir. Soekarno mengadakan pembelaan dalam judul Indonesia Menggugat. Atas dasar tindakan melanggar Pasal "karet" 153 bis dan Pasal 169 KUHP, para pemimpin PNI dianggap mengganggu ketertiban umum dan menentang kekuasaan Belanda sehingga dijatuhi hukuman penjara di Penjara Sukamiskin Bandung. Sementara itu, pimpinan PNI untuk sementara dipegang oleh Mr. Sartono dan dengan pertimbangan demi keselamatan maka pada tahun 1931 oleh pengurus besarnya PNI dibubarkan. Hal ini menimbulkan pro dan kontra.

Mereka yang pro pembubaran, mendirikan partai baru dengan nama Partai Indonesia (Partindo) di bawah pimpinan Mr. Sartono. Kelompok yang kontra, ingin tetap melestarikan nama PNI dengan mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta dan Sutan Syahrir.

9. Gerakan Wanita



Munculnya gerakan wanita di Indonesia, khususnya di

Jawa dirintis oleh R.A. Kartini yang kemudian dikenal sebagai pelopor pergerakan wanita Indonesia. R.A. Kartini bercita-cita untuk mengangkat derajat kaum wanita Indonesia melalui pendidikan. Cita-citanya tersebut tertulis dalam surat-suratnya yang kemudian berhasil dihimpun dalam sebuah buku yang diterjemahkan dalam judul *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Cita-cita R.A. Kartini ini mempunyai persamaan dengan Raden Dewi Sartika yang berjuang di Bandung.

RA Kartini

Semasa Pergerakan Nasional maka muncul gerakan wanita yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial budaya. Organisasi-organisasi yang ada, antara lain sebagai berikut.

1. Putri Mardika di Batavia (1912) dengan tujuan membantu keuangan bagi wanita-wanita yang akan melanjutkan sekolahnya. Tokohnya, antara lain R.A. Saburudin, R.K. Rukmini, dan R.A. Sutinah Joyopranata.
2. Kartini founds, yang didirikan oleh suami istri T.Ch. van Deventer (1912) dengan membentuk sekolah-sekolah Kartini bagi kaum wanita, seperti di Semarang, Batavia, Malang, dan Madiun.
3. Kerajinan Amal Setia, di Koto Gadang Sumatra Barat oleh Rohana Kudus (1914). Tujuannya meningkatkan derajat kaum wanita dengan cara memberi pelajaran membaca, menulis, berhitung, mengatur rumah tangga, membuat kerajinan, dan cara pemasarannya.
4. Aisyiah, merupakan organisasi wanita Muhammadiyah yang didirikan oleh Ny. Hj. Siti Walidah Ahmad Dahlan (1917). Tujuannya untuk memajukan pendidikan dan keagamaan kaum wanita.
5. Organisasi Kewanitaan lain yang berdiri cukup banyak, misalnya Pawiyatan Wanito di Magelang (1915), Wanito Susilo di Pemalang (1918), Wanito Rukun Santoso di Malang, Budi Wanito di Solo, Putri Budi Sejati di Surabaya (1919), Wanito Mulyo di Yogyakarta (1920), Wanito Utomo dan Wanito Katolik di Yogyakarta (1921), dan Wanito Taman Siswa (1922).

Organisasi wanita juga muncul di Sulawesi Selatan dengan nama Gorontaloesche Mohammadaanche Vrouwenvereeniging. Di Ambon dikenal dengan nama Ina Tani yang lebih condong ke politik. Sejalan dengan berdirinya organisasi wanita, muncul juga surat kabar wanita yang bertujuan untuk menyebarluaskan gagasan dan pengetahuan kewanitaan. Surat kabar milik organisasi wanita, antara lain Putri Hindia di Bandung, Wanito Sworo di Brebes, Sunting Melayu di Bukittinggi, Esteri Utomo di Semarang, Suara Perempuan di Padang, Perempuan Bergolak di Medan, dan Putri Mardika di Batavia.

Puncak gerakan wanita, yaitu dengan diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22–25 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres menghasilkan bentuk perhimpunan wanita berskala nasional dan berwawasan kebangsaan, yakni Perikatan Perempuan Indonesia (PPI). Dalam Kongres Wanita II di Batavia pada tanggal 28–31 Desember 1929 PPI diubah menjadi Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia (PPII). Kongres Wanita I merupakan awal dari bangkitnya kesadaran nasional di kalangan wanita Indonesia sehingga tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai hari Ibu.

Demikianlah Materi Organisasi Pergerakan Nasional (Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, Muhammadiyah dan Lainnya), semoga bermanfaat.

Latihan

Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Organisasi pertama pada masa pergerakan nasional adalah
 - a. Budi utomo
 - b. Sarekat Islam
 - c. Indische Partij
 - d. PUTERA
2. School Tot Opleiding van Inlandse Arsten (STOVIA) adalah sekolah..... pribumi
 - a. Kehakiman
 - b. Keguruan
 - c. Kedokteran
 - d. Kejuruan
3. Sekolah STOVIA berada di Kota
 - a. Medan
 - b. Bandung
 - c. Surabaya
 - d. Jakarta
4. Sekolah STOVIA merupakan perwujudan dari trias politica di bidang
 - a. Irigasi
 - b. Edukasi
 - c. emigrasi
 - d. remigrasi
5. Tanggal 20 Mei 1908 merupakan kelahiran organisasi
 - a. Budi utomo
 - b. Sarekat Islam
 - c. Indische Partij
 - d. PUTERA
6. Setiap tanggal 20 Mei bagi bangsa Indonesia diperingati sebagai hari
 - a. Sumpah pemuda
 - b. Kebangkitan nasional
 - c. Kesaktian Pancasila
 - d. Keluarga Berencana
7. Pada tahun 1912 Indische Partij menerbitkan surat kabar yang bernama
 - a. Batavia Nouvelles
 - b. Sinar Hindia
 - c. Nettihschrift
 - d. de Express
19. Pelajar Bumiputera membuat majalah yang semula bernama Hindia Poetra menjadi
 - a. Indonesia Merdeka
 - b. Indonesia Raya
 - c. Nettihschrift
 - d. de Express
8. Nama Indonesia pertama kali diperkenalkan pada tahun 1850 oleh
 - a. A. Bastian
 - b. Dr. Ratulangi
 - c. Jr. Logan
 - d. G. Winsor Earl
9. Kongres Pemuda ke-II dilaksanakan di kota
 - a. Bogor
 - b. Bandung
 - c. Surabaya
 - d. Jakarta

10. Sumpah pemuda diikrarkan pada tanggal
- a. 20 - 05 - 1908
 - b. 20 - 01 - 1913
 - c. 25 - 12 - 1912
 - d. 28 - 10 - 1928
11. Masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi merupakan faktor pendorong pergerakan nasional dari
- a. Dalam negeri
 - b. Luar negeri
 - c. kaum liberal
 - d. kaum kapitalis
12. Penderitaan rakyat akibat penjajahan merupakan faktor pendorong pergerakan nasional dari
- a. Dalam negeri
 - b. Luar negeri
 - c. kaum liberal
 - d. kaum kapitalis
13. Pergerakan nonkooperatif disebut juga dengan masa
- a. Radikal
 - b. Moderat
 - c. kolonialisme
 - d. imperialisme
14. Pergerakan kooperatif disebut juga dengan masa
- a. Radikal
 - b. Moderat
 - c. kolonialisme
 - d. imperialisme
15. Pergerakan kooperatif artinya
- a. Bekerjasama dengan Belanda
 - b. Bekerjasama dengan Sekutu
 - c. Tidak bekerjasama dengan Belanda
 - d. Tidak bekerjasama dengan Sekutu
16. Perang Paderi merupakan contoh pergerakan yang bersifat
- a. Radikal
 - b. Moderat
 - c. kolonialisme
 - d. imperialisme
17. Budi Utomo merupakan contoh pergerakan yang bersifat
- a. Radikal
 - b. Moderat
 - c. kolonialisme
 - d. imperialisme
18. Budi Utomo didirikan atas prakarsa
- a. R.M. Tirtoadisuryo
 - b. R.T. Aryokusumo
 - c. dr. Wahidin S.
 - d. dr. Sutomo
19. Budi Utomo berarti
- a. Utang budi
 - b. Usaha mulia
 - c. akal pikiran
 - d. hati nurani
20. Budi Utomo adalah organisasi yang bergerak di bidang
- a. ekonomi dan politik
 - b. sosial dan budaya
 - c. ekonomii dan budaya
 - d. sosial dan politik

21. Berdasarkan hasil keputusan Kongres I, ruang Budi Utomo terbatas di
- Jawa dan Bali
 - Jawa dan Sumatera
 - Jawa dan Madura
 - Pulau Jawa saja
22. Hasil keputusan Kongres I, ditetapkan pusat organisasi Budi Utomo berada di Kota
- Jogjakarta
 - Bandung
 - Surabaya
 - Jakarta
23. Pada tahun 1935 Budi Utomo bergabung dengan Persatuan Bangsa Indonesia dan membentuk organisasi baru yaitu
- Sarekat Islam
 - Indische Partij
 - Gerindra
 - Parindra
24. Sarekat Islam didirikan pada tahun 1909 di kota
- Jogjakarta
 - Bandung
 - Surabaya
 - Jakarta
25. Pendiri Sarekat Islam adalah
- R.M. Tirtoadisuryo
 - R.T. Aryokusumo
 - dr. Wahidin S.
 - dr. Sutomo
26. Ketidaksetujuan akan hasil kongres SI ke-IV di Jakarta menyebabkan
- SI terpecah menjadi dua kubu
 - SI bukan partai politik
 - SI hanya untuk rakyat biasa
 - SI ingin menyatukan bangsa Indonesia
27. SI beraliran putih berlandaskan
- Nasionalisme dan agama Islam
 - Komunisme dan sosialis
 - Nasionalisme dan demokratis
 - Komunisme dan radikal
28. Semaun dan Sneevliet adalah tokoh dari
- SI putih
 - SI merah
 - SI hitam
 - SI baru
29. Perhatikan nama tokoh di bawah ini.
- 1) HOS. Cokroaminoto
 - 2) H. Agus Salim
 - 3) Douwes Dekker
 - 4) Suwardi Suryaningrat
 - 5) Cipto Mangunkusumo
 - 6) Suryopranoto

- Pendiri Indische Partij ditunjukkan oleh nomor
- a. 1), 2), dan 6)
 - b. 2), 3), dan 4)
 - c. 3), 4), dan 5)
 - d. 4), 5), dan 6)
30. Indische Partij didirikan tanggal 25 Desember 1912 di kota
- a. Jogjakarta
 - b. Bandung
 - c. Surabaya
 - d. Jakarta
31. Indische Partij dipandang sebagai partai pertama yang berlandaskan
- a. Sosialisme
 - b. Kapitalisme
 - c. nasionalisme
 - d. marhaenisme
32. Tulisan “Als ik eens Nederlander was” antara lain menyindir kolonial Belanda yang tidak berperasaan dan tidak tahu malu karena meminta bantuan bangsa Indonesia yang sudah miskin karena dijajah, ditulis oleh
- a. Douwes Dekker
 - b. Suwardi Suryaningrat
 - c. Cipto Mangunkusumo
 - d. Suryopranoto
33. Organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya oleh
- a. KH. Ahmad Dahlan
 - b. KH. Hasyim Asy’ari
 - c. H. Agus Salim
 - d. H. Muhidin
34. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh beberapa mahasiswa Indonesia di
- a. Belgia
 - b. Amerika Serikat
 - c. Jepang
 - d. Belanda
35. Partai Komunis Indonesia (PKI) didirikan di Semarang tanggal 23 Mei 1902 oleh
- a. Semaun
 - b. Sartono
 - c. Sneevliet
 - d. Darsono
36. Pendiri awal Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan di Bandung tanggal 4 Juli 1927 oleh
- a. Moh. Hatta
 - b. Sutan Syahrir
 - c. Ir. Soekarno
 - d. Sutan Batoegana
37. PNI bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka atas usahanya sendiri dengan ideologinya yang disebut
- c. Sosialisme
 - d. Kapitalisme
 - c. nasionalisme
 - d. marhaenisme
38. Muhammad Husni Thamrin, Amir Syarifuddin, dan Abikusno Cokro Suyoso adalah beberapa tokoh dari
- a. Parindra
 - b. Gerindo
 - c. GAPI
 - d. Jong Celebes

39. Diskriminasi ras dan intimidasi merupakan kondisi bangsa Indonesia di bidang
- a. Politik
 - b. Ekonomi
 - c. Sosial
 - d. Budaya
40. Mabuk-mabukan, pergaulan bebas, pemerasan, dan penindasan merupakan contoh pengaruh penjajahan di bidang
- a. Politik
 - b. Ekonomi
 - c. Sosial
 - d. Budaya

Essay

1. Jelaskan menurut pendapatmu faktor-faktor yang menyebabkan munculnya organisasi pergerakan nasional.
2. Jelaskan perbedaan perjuangan rakyat Indonesia sebelum 1901 dan sesudahnya.
3. Jelaskan ciri khas organisasi pergerakan Budi Oetomo.
4. Jelaskan penyebab terjadi perpecahan di Sarekat Islam
5. Jelaskan tujuan didirikannya Muhammadiyah.
6. Jelaskanlah tujuan didirikannya Gerakan Pemuda.
7. Bagaimanakah pola pendidikan di Taman Siswa
8. Jelaskan prinsip yang dipakai oleh organisasi PNI.
9. Jelaskan 3 organisasi perempuan bidang pendidikan.
10. Nilai-nilai apasaja yang dapat dipetik dari materi organisasi pergerakan nasional.

BAB IV

Peristiwa Sekitar Proklamasi dan Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia

A. Peristiwa Sekitar Proklamasi

1. Kekalahan Jepang Dalam Perang Pasifik

Pengeboman atas Kota Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945) membuat Jepang tidak punya pilihan lain selain menyerah. Bom-bom sekutu telah menghancurkan kawasan industri strategis Jepang termasuk industri galangan kapal. Hancurnya armada-armada dagang menghambat pasokan bahan mentah (seperti batu bara, besi, besi baja, karet dan minyak bumi dari negara-negara yang didudukinya (termasuk minyak bumi dari Indonesia). Jepang sangat bergantung pada bahan baku dari luar negeri untuk kebutuhan industrinya. Sadar bahwa kekalahan tidak terelakkan, pada 15 Agustus 1945 Kaisar Jepang Hirohito mengumumkan penyerahan tanpa syarat (kapitulasi) kepada sekutu. Dengan demikian perang di Pasifik berakhir. Perjanjian penyerahan Jepang kepada Sekutu ditanda tangani secara resmi di atas kapal USS Missouri pada 2 September 1945, dengan wakil Sekutu Jendral Douglas MacArthur dan wakil Jepang Menteri Luar Negeri Mamoru Shigemitsu.

2. Peristiwa Rengasdengklok

Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas dengan dijatuhkannya bom atom oleh Sekutu di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibat peristiwa tersebut, kekuatan Jepang makin lemah. Kepastian berita kekalahan Jepang terjawab ketika tanggal 15 Agustus 1945 dini hari, Sekutu mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat dan perang telah berakhir. Berita tersebut diterima melalui siaran radio di Jakarta oleh para pemuda yang termasuk orang-orang Menteng Raya 31 seperti Chaerul Saleh, Abubakar Lubis, Wikana, dan lainnya. Penyerahan Jepang kepada Sekutu menghadapkan para pemimpin Indonesia pada masalah yang cukup berat. Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan (vacuum of power). Jepang masih tetap berkuasa atas Indonesia meskipun telah menyerah, sementara pasukan Sekutu yang akan menggantikan mereka belum datang. Gunseikan telah mendapat perintah-perintah khusus agar mempertahankan status quo sampai kedatangan pasukan Sekutu. Adanya kekosongan kekuasaan menyebabkan munculnya konflik antara golongan muda dan golongan tua mengenai masalah kemerdekaan Indonesia. Golongan muda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan. Mereka itu antara lain Sukarni, B.M Diah, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik, dan Chaerul Saleh. Sedangkan golongan tua menginginkan prokla masi kemerdekaan harus dirapatkan dulu dengan anggota PPKI. Mereka adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Moh. Yamin, Dr. Buntaran, Dr. Syamsi dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Golongan muda kemudian mengadakan rapat di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15

Agustus 1945 pukul 20.00 WIB. Rapat tersebut dipimpin oleh Chaerul Saleh yang menghasilkan keputusan tuntutan-tuntutan golongan muda yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hal dan soal rakyat Indonesia sendiri, tidak dapat digantungkan kepada bangsa lain. Segala ikatan, hubungan dan janji kemerdekaan harus diputus, dan sebaliknya perlu mengadakan perundingan dengan Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta agar kelompok pemuda diikutsertakan dalam menyatakan proklamasi.



Sumber: *Ilustrasi bagian produksi*

Gambar 11.3 Lokasi Rengasdengklok.

Langkah selanjutnya malam itu juga sekitar jam 22.00 WIB Wikana dan Darwis mewakili kelompok muda mendesak Soekarno agar bersedia melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya lepas dari Jepang. Ternyata usaha tersebut gagal. Soekarno tetap tidak mau memproklamasikan kemerdekaan. Kuatnya pendirian Ir. Soekarno untuk tidak memproklamasikan kemerdekaan sebelum rapat PPKI menyebabkan golongan muda berpikir bahwa golongan tua mendapat pengaruh dari Jepang. Selanjutnya golongan muda mengadakan rapat di Jalan Cikini 71 Jakarta pada pukul 24.00 WIB menjelang tanggal 16 Agustus 1945. Mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok.

Rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta harus diamankan dari pengaruh Jepang. Tujuan para pemuda mengamankan Soekarno Hatta ke Rengasdengklok antara lain:

- a. agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh Jepang, dan
- b. mendesak keduanya supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 pagi, Soekarno dan Hatta tidak dapat ditemukan di Jakarta. Mereka telah dibawa oleh para pemimpin pemuda, di antaranya Sukarni, Yusuf Kunto, dan Syudanco Singgih, pada malam harinya ke garnisun PETA (Pembela Tanah Air) di Rengasdengklok, sebuah kota kecil yang terletak sebelah Utara Karawang. Pemilihan Rengasdengklok sebagai tempat pengamanan Soekarno Hatta, didasarkan pada perhitungan militer. Antara anggota PETA Daidan Purwakarta dan Daidan Jakarta terdapat hubungan erat sejak keduanya melakukan latihan bersama. Secara geografis, Rengasdengklok letaknya terpencil, sehingga dapat dilakukan deteksi dengan mudah setiap gerakan tentara Jepang

yang menuju Rengasdengklok, baik dari arah Jakarta, Bandung, atau Jawa Tengah. Mr. Ahmad Subardjo, seorang tokoh golongan tua merasa prihatin atas kondisi bangsanya dan terpanggil untuk mengusahakan agar proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan secepat mungkin. Untuk tercapainya maksud tersebut, Soekarno Hatta harus segera dibawa ke Jakarta.

Akhirnya Ahmad Subardjo, Sudiro, dan Yusuf Kunto segera menuju Rengasdengklok. Rombongan tersebut tiba di Rengasdengklok pukul 17.30 WIB. Peranan Ahmad Subardjo sangat penting dalam peristiwa kembalinya Soekarno Hatta ke Jakarta, sebab mampu meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan keesokan harinya paling lambat pukul 12.00 WIB, nyawanya sebagai jaminan. Akhirnya Subeno sebagai komandan kompi Peta setempat bersedia melepaskan Soekarno Hatta ke Jakarta.

3 . Perumusan Naskah Proklamasi



Sumber: *Ensiklopedi Nasional Indonesia 1991*

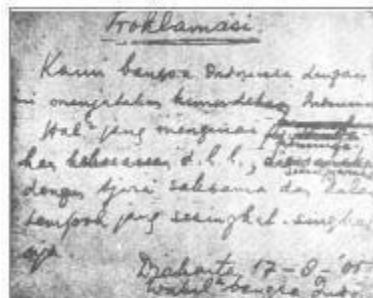
Sekitar pukul 21.00 WIB Soekarno Hatta sudah sampai di Jakarta dan langsung menuju ke rumah Laksa mana Muda Maeda, Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta untuk menyusun teks proklamasi. Dalam kondisi demikian, peran **Laksamana Maeda** cukup penting. Pada saat-saat yang genting, Maeda menunjukkan kebesaran moralnya, bahwa kemerdekaan merupakan aspirasi alamiah dan hak dari setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Berikut ini tokoh-tokoh yang terlibat secara langsung dalam perumusan teks proklamasi.

- Ahmad Subardjo mengusulkan konsep kalimat pertama yang berbunyi; "*Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami*" kemudian berubah menjadi "*Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia*".
- Soekarno menuliskan konsep kalimat kedua yang berbunyi; "*Hal-hal yang mengenai pemerintahan kekuasaan, dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya*".
- Mohammad Hatta menggabungkan kedua kalimat di atas dan disempurnakan sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki.

Sumber: *Sejarah Nasional Indonesia VI, 1993*

Tokoh yang Berperan dalam Penyusunan Teks Proklamasi

4 . Proklamasi Kemerdekaan Indonesia



Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka, 1981*

Gambar 11.5 Naskah teks proklamasi yang berupa konsep.

Setelah rumusan teks proklamasi selesai dirumuskan muncul permasalahan, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi? Soekarno mengusulkan agar semua yang hadir dalam rapat tersebut menandatangani naskah proklamasi sebagai "**Wakil-wakil Bangsa Indonesia**". Usulan Soekarno tidak disetujui para pemuda sebab sebagian besar yang hadir adalah anggota PPKI, dan PPKI dianggap sebagai

badan bentukan Jepang. Kemudian Sukarni menyarankan agar Soekarno Hatta yang menandatangani teks proklamasi **atas nama bangsa Indonesia**. Saran dan usulan Sukarni diterima.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka Edisi 1945 - 1949, 1981

Gambar 11.6 Kediaman Ir. Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekarang Jalan Proklamasi.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka Edisi 1945 - 1949, 1981

Gambar 11.7 Teks Proklamasi Kemerdekaan yang autentik.

Langkah selanjutnya, Soekarno minta kepada Sayuti Melik untuk mengetik konsep teks proklamasi dengan beberapa perubahan, kemudian ditandatangani oleh Soekarno Hatta. Perubahan-perubahan tersebut meliputi:

- kata "**tempoh**" diubah menjadi **tempo**,
- wakil-wakil bangsa Indonesia** diubah menjadi "**Atas nama bangsa Indonesia**", dan
- tulisan "**Djakarta, 17-8-'05**" diubah menjadi **Djakarta, hari 17 boelan 8 tahun '05**. Naskah hasil ketikan Sayuti Melik merupakan naskah proklamasi yang **autentik**. Malam itu juga diputuskan bahwa naskah proklamasi akan dibacakan pukul 10.00 pagi di Lapangan Ikada, Gambir. Tetapi karena ada kemungkinan timbul bentrokan dengan pasukan Jepang yang terus berpatroli, akhirnya diubah di

kediaman Soekarno, **Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta**. Sejak pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Ir. Soekarno Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta telah diadakan berbagai persiapan untuk menyambut Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kurang lebih pukul 09.55 WIB, Drs. Mohammad Hatta telah datang dan langsung menemui Ir. Soekarno. Sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan, pukul 10.00 WIB Soekarno menyampaikan pidatonya, yang berbunyi:

Saudara-saudara sekalian!

Saja sudah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menjaksikan satu peristiwa maha penting dalam sedjarah kita.

Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berdjoang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnja aksi kita untuk menjapai kemerdekaan kita itu ada naik dan ada turun, tetapi djiwa kita tetap menudju ke arah tjita-tjita.

Djuga di dalam djaman Djepang, usaha kita untuk menjapai kemerdekaan nasional tidak henti-henti. Di dalam djaman Djepang ini, tampaknja sadja kita menjandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnja, tetap kita menjusun tenaga kita sendiri, tetap kita pertjaja kepada kekuatan kita sendiri.

Sekarang tibalah saatnja kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Harja bangsa jang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnja.

Maka kami, tadi malam telah mengadakan musjawarat dengan pemuka-pemuka rakjat Indonesia, dari seluruh rakjat Indonesia. Permusjawaratan itu seia-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnja untuk menjatakan kemerdekaan kita.

Saudara-saudara! Dengan ini kami njatakan kebulatan tekad itu.

Dengarlah proklamasi kami.

PROKLAMASI

*Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara
saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.*

*Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen '05
Atas nama bangsa Indonesia,*

Soekarno/Hatta

Demikianlah, saudara-saudara!
Kita sekarang telah merdeka!
Tidak ada satu ikatan lagi jang mengikat tanah air kita bangsa kita!
Mulai saat ini kita menjusun Negara kita! Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia,
merdeka, kekal abadi.
Insja Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu!

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Proklamasi_Kemerdekaan_Republik_Indonesia



Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka Edisi 1945 - 1949, 1981

Gambar 11.1 Pengibaran bendera Merah Putih saat upacara Proklamasi Kemerdekaan.

Demikianlah teks proklamasi kemerdekaan telah dibacakan oleh Ir. Soekarno. Susunan acara yang direncanakan dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan yaitu:

- a. pembacaan proklamasi oleh **Ir. Soekarno**,
- b. pengibaran bendera Merah Putih oleh **Suhud** dan **Latief Hendraningrat**, dan
- c. sambutan Walikota **Suwirjo** dan **dr. Muwardi**.

Setelah dibacakan teks proklamasi, maka telah lahir Republik Indonesia. Suatu peristiwa yang bersejarah bagi bangsa Indonesia telah terjadi. Peristiwa yang sangat lama dinantikan oleh segenap lapisan masyarakat, tetapi membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Untuk mengenang jasa-jasa Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta dalam peristiwa proklamasi, maka keduanya diberi gelar **Pahlawan Proklamasi (Proklamator)**. Selain itu Jalan Pegangsaan Timur diubah namanya menjadi Jalan Proklamasi, dan dibangun Monumen Proklamasi.

5. Penyebaran Berita Proklamasi dan Sikap Rakyat di Berbagai Daerah



Sumber: Sejarah Nasional Indonesia V, 1993
Gambar 11.8 Gedung Menteng 31 yang digunakan sebagai tempat pemancar radio yang baru.

Wilayah Indonesia sangatlah luas. Komunikasi dan transportasi sekitar tahun 1945 masih sangat terbatas. Di samping itu, hambatan dan larangan untuk menyebarkan berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia, merupakan sejumlah faktor yang menyebabkan berita proklamasi mengalami keterlambatan di sejumlah daerah, terutama di luar Jawa. Namun dengan penuh tekad dan semangat berjuang, pada akhirnya peristiwa proklamasi diketahui oleh segenap rakyat Indonesia. Lebih jelasnya ikuti pembahasan di

bawah ini. Penyebaran proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di daerah Jakarta dapat dilakukan secara cepat dan segera menyebar secara luas. Pada hari itu juga, teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari Kantor Domei, Waidan B. Palenewen. Ia menerima teks proklamasi dari seorang wartawan Domei yang bernama Syahrudin. Kemudian ia memerintahkan F. Wuz (seorang markonis), supaya berita proklamasi disiarkan tiga kali berturut-turut. Baru dua kali F. Wuz melaksanakan tugasnya, masuklah orang Jepang ke ruangan radio sambil marah-marah, sebab mengetahui berita proklamasi telah tersiar ke luar melalui udara.

Meskipun orang Jepang tersebut memerintahkan penghentian siaran berita proklamasi, tetapi Waidan Palenewen tetap meminta F. Wuz untuk terus menyiarkan. Berita proklamasi kemerdekaan diulangi setiap setengah jam sampai pukul 16.00 saat siaran berhenti. Akibat dari penyiaran tersebut, pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita dan menyatakan sebagai kekeliruan. Pada tanggal 20 Agustus 1945 pemancar tersebut disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Sekalipun pemancar pada kantor Domei disegel, para pemuda bersama Jusuf Ronodipuro (seorang pembaca berita di Radio Domei) ternyata membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio, di antaranya Sukarman, Sutanto, Susilahardja, dan Suhandar. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31, dengan kode panggilan DJK 1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan.

Usaha dan perjuangan para pemuda dalam penyebarluasan berita proklamasi juga dilakukan melalui media pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Harian Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang memuat berita proklamasi. Beberapa tokoh pemuda yang berjuang melalui media pers antara lain B.M. Diah, Sayuti Melik, dan Sumanang. Proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan kepada rakyat Indonesia melalui pemasangan plakat, poster, maupun coretan pada dinding tembok dan gerbong kereta api, misalnya dengan slogan "Respect our Constitution, August 17!" Hormatilah Konstitusi kami tanggal 17 Agustus! Melalui berbagai cara dan media tersebut, akhirnya berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas di wilayah Indonesia dan di luar negeri. Di samping melalui media massa, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Berikut ini para utusan PPKI yang ikut menyebarkan berita proklamasi.

1. Teuku Mohammad Hassan dari Aceh.
2. Sam Ratulangi dari Sulawesi.
3. Ktut Pudja dari Sunda Kecil (Bali).
4. A. A. Hamidan dari Kalimantan.

B. Makna dan Arti Penting Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Proklamasi kemerdekaan adalah titik balik bangsa Indonesia menjadi Negara yang merdeka. Dengan adanya proklamasi itu memberikan semangat

dorongan untuk warga Indonesia untuk lebih berjuang lagi untuk kemerdekaan dan mempertahankan martabat bangsa. **Makna proklamasi ditinjau dari beberapa segi adalah:**

1. Sosial Budaya

Dengan Proklamasi memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi rakyat yang cerdas mandiri dan berkependidikan dan mempunyai nilai-nilai budaya yang tinggi.

2. Ekonomi

Proklamasi memberikan arah dan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan rakyat yang sejahtera dan mempunyai kekuasaan dalam menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri

3. Politik

Melalui Proklamasi adalah suatu pernyataan kemerdekaan yang berisi dan menyatakan keputusan bangsa Indonesia yang telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan dari para penjajah penjajah dan bukti kemenangan atas mereka. Dan Selain itu, melalui Proklamasi bangsa Indonesia menyatakan sikap untuk membangun kehidupan baru menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil, dan makmur.

4. Pendidikan

Melalui proklamasi juga Indonesia bertekad untuk memajukan kehidupan rakyat yang menjadi rakyat yang pintar jauh dari keterbelakangan dan merata bagi setiap warganya dengan tidak ada pembatasan ataupun hukum hukum diskriminasi.

5. Hukum

proklamasi merupakan pernyataan yang berisi keputusan bangsa Indonesia untuk menetapkan tatanan hukum nasional (Indonesia) dan menghapuskan tatanan hukum kolonial. Proklamasi menjadi alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia, bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan.

Dengan proklamasi kemerdekaan tersebut, maka bangsa Indonesia telah lahir sebagai bangsa dan negara yang merdeka, baik secara **de facto** maupun secara **de jure**.

C. Terbentuknya Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia serta Kelengkapannya

Setelah proklamasi kemerdekaan PPKI menggelar sidang yang berlangsung dari 19 -22 Agustus 1945. Sidang PPKI merupakan kelanjutan dari sidang-sidang yang telah diselenggarakan melalui BPUPKI PADA 10-16 Juli 1945 yang telah membahas dan menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar. Sebelum rapat dimulai, muncul permasalahan yang disampaikan oleh wakil dari luar Jawa, di antaranya Mr. Latuharhary (Maluku), Dr. Sam Ratulangi (Sulawesi), Mr. Tadjudin Noor dan Ir. Pangeran Noor (Kalimantan), dan Mr. I Ktut Pudja (Nusa Tenggara) yang menyampaikan keresahan penduduk non-Islam mengenai kalimat dalam Piagam

Jakarta yang nantinya akan dijadikan rancangan pembukaan dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalimat yang dimaksud adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya”, serta “syarat seorang kepala negara haruslah seorang muslim”. Untuk mengatasi masalah tersebut Drs. Mohammad Hatta beserta Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singadimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hassan membicarakannya secara khusus. Akhirnya dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas dan menegakkan Negara Republik Indonesia yang baru saja didirikan, rumusan kalimat yang dirasakan memberatkan oleh kelompok non-Islam dihapus sehingga menjadi berbunyi “ Ketuhanan Yang Maha Esa” dan syarat seorang kepala negara adalah orang Indonesia asli. Untuk memahami hasil sidang secara lengkap, maka perhatikan tabel berikut.

Berikut ini beberapa keputusan penting dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh *Dokuritsu Junbi Coosakai* (BPUPKI), yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi atas usul dari Otto Iskandardinata.
3. Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum terbentuk. Pada hari berikutnya, tanggal 19 Agustus 1945 PPKI melanjutkan sidangnya dan berhasil memutuskan beberapa hal berikut.
 1. Pembagian wilayah, terdiri atas 8 provinsi.
 - a. Jawa Barat, gubernurnya Sutarjo Kartohadikusumo
 - b. Jawa Tengah, gubernurnya R. Panji Suroso

- c. Jawa Timur, gubernurnya R.A. Suryo
- d. Borneo (Kalimantan), gubernurnya Ir. Pangeran Muhammad Noor
- e. Sulawesi, gubernurnya Dr. G.S.S.J. Sam Ratulangi
- f. Maluku, gubernurnya Mr. J. Latuharhary
- g. Sunda Kecil (Nusa Tenggara), gubernurnya Mr. I. Gusti Ktut Pudja
- h. Sumatra, gubernurnya Mr. Teuku Mohammad Hassan
2. Membentuk Komite Nasional (Daerah).
3. Menetapkan 12 departemen dengan menternya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara. Berikut ini 12 departemen tersebut.
 - a. Departemen Dalam Negeri dikepalai R.A.A. Wiranata Kusumah
 - b. Departemen Luar Negeri dikepalai Mr. Ahmad Subardjo
 - c. Departemen Kehakiman dikepalai Prof. Dr. Mr. Supomo
 - d. Departemen Keuangan dikepalai Mr. A.A Maramis
 - e. Departemen Kemakmuran dikepalai Surachman Cokroadisurjo
 - f. Departemen Kesehatan dikepalai Dr. Buntaran Martoatmojo
 - g. Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan dikepalai Ki Hajar Dewantara
 - h. Departemen Sosial dikepalai Iwa Kusumasumantri
 - i. Departemen Pertahanan dikepalai Supriyadi
 - j. Departemen Perhubungan dikepalai Abikusno Tjokrosuyoso
 - k. Departemen Pekerjaan Umum dikepalai Abikusno Tjokrosuyoso
 - l. Departemen Penerangan dikepalai Mr. Amir Syarifudin

Sedangkan 4 menteri negara yaitu:

1. Menteri negara Wachid Hasyim
2. Menteri negara M. Amir
3. Menteri negara R. Otto Iskandardinata
4. Menteri negara R.M Sartono

Di samping itu diangkat pula beberapa pejabat tinggi negara yaitu:

1. Ketua Mahkamah Agung, Dr. Mr. Kusumaatmaja
2. Jaksa Agung, Mr. Gatot Tarunamihardja
3. Sekretaris negara, Mr. A.G. Pringgodigdo
4. Juru bicara negara, Soekarjo Wirjopranoto

Sidang PPKI yang ketiga tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan:

1. Pembentukan Komite Nasional
2. Membentuk Partai Nasional Indonesia
3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka Edisi 1945 - 1949, 1981*

BAB V

Disintegrasi Nasional

1. Upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi pemberontakan (Nasional)

Sejarah pertahanan keamanan Indonesia yang bermula pada tahun 1945, telah memberikan pengalaman yang berharga dan nilai-nilai perjuangan yang penting dihimpun dan disusun dalam suatu konsepsi pertahanan keamanan yang tangguh dan ampuh, bagi upaya dalam pertahanan keamanan Negara berdasarkan falsafah bangsa dan ideologi serta dasar Negara Pancasila dan Undang Undang Dasar RI 1945 (UUD 1945).

A. Peristiwa awal pada masa kemerdekaan

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 berarti Indonesia mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Akan tetapi banyak golongan yang tidak setuju dengan sistem pemerintahan tersebut sehingga mereka melakukan banyak pemberontakan. Pemberontakan di Indonesia memberlakukan demokrasi liberal, pemerintah Indonesia menghadapi beberapa masalah. Dua diantaranya adalah masalah ekonomi dan hankam. Dalam bidang hankam, beberapa pemberontakan-pemberontakan bersenjata Pemberontakan-pemberontakan tersebut seperti pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DI/TII, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan dan juga gerakan PRRI/Permesta.

1. Pemberontakan DI/TI

Gerakan ini terjadi di beberapa daerah , antara lain :

- A. Di Jabar , di pimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo
- B. Di Jateng , dipimpin oleh Amir Fatah
- C. Di Kalsel , di pimpin oleh Kahar Muzakar
- D. Di Aceh , dipimpin oleh Daud Beureuh

A. Gerakan DI/TII di Jawa Barat

Saat terjadi perjanjian Renville antara RI dan Belanda tahun 1948, yang mewajibkan pengikut Republik untuk mengosongkan wilayah gerilya di Jabar, S.M Kartosuwiryo menolak karena sejak masih aktif melawan Belanda untuk kemerdekaan, ia bercita-cita mendirikan negara Islam . Bersama pasukannya yang berjumlah 2000 orang yang disebut Hizbullah dan Sabillah ia tetap tinggal di Jabar. Pada saat itu terjadi Vakum of Power karena hijrahnya TNI Siliwangi ke daerah Jateng. Keadaan ini sangat dimanfaatkan oleh S.M Kartosuwiryo untuk

menggantikan peran TNI Siliwangi dalam melakukan perlawanan bersenjata dengan Belanda. Hal ini menarik simpati rakyat. Untuk itu dia melakukan rapat dengan para pengikutnya. Rapat /Konfensi ini dilaksanakan pada bulan Maret 1948 di Cipeundeuy, Tasikmalaya, Jabar.

Hasil konferensi tersebut, yaitu :

- 1) Mengadakan persiapan membentuk Negara Islam Indonesia (NII)
- 2) Membentuk Tentara Islam Indonesia (TII)
- 3) Membentuk Majelis Islam yang dikepalai seorang imam, yaitu S.M Kartosuwiryo
- 4) Majelis tersebut harus merupakan sebuah pemerintahan Islam sementara di Jabar yang harus ditaati oleh seluruh umat islam di daerah tersebut.

B. Gerakan DI/TI di Jawa Tengah

Gerakan DI/TII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah. Daerah yang merupakan daerah petualangan gerombolan DI/TII itu meliputi daerah Brebes, Pekalongan, dan Tegal. Proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) di Jawa Tengah ini berlangsung tanggal 23 Agustus 1949 dan menyatakan bagian dari NII di Jawa Barat. Untuk menumpas petualangan gerakan DI/TII di Jawa Tengah, pemerintah membentuk Komando operasi yang diberi nama Gerakan Banteng Negara (GBN) pada bulan Januari 1950 di bawah pimpinan Kolonel Sarbini, Letkol M. Bahrum, dan Letkol Ahmad Yani. Namun, operasi militer yang dilancarkan ini tidak membawa hasil, karena kedudukan DI/TII semakin kuat yang disebabkan adanya kalangan militer resmi yang bergabung dengan kaum pemberontak, antara lain :

Para pemberontak dari Angkatan Umat Islam (AUI) pimpinan Kyai Mohammad Mahfudz Abdurahman (Romo Pusat/ Kyai Somalangu). Para pemberontak dari Batalyon 426 Kudus dan Magelang yang menggabungkan diri pada bulan Desember 1952. Komandan Brigade Pragolo dari divisi Diponegoro mengambil langkah untuk menumpas gerakan tersebut. Untuk tugas ini, panglima operasi membentuk pasukan khusus Benteng Raiders dengan mengerahkan satuan-satuan kavaleri, zeni, artileri, dan AURI. Dengan operasi-operasi tersebut akhirnya DI/TII di Jawa Tengah dapat diumpaskan pada awal tahun 1952.

C. Gerakan DI/TI di Kalimantan Selatan

Gerakan DI/TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang memiliki beberapa nama samaran, yakni Haderi Bin Umar atau Angli. Pada tanggal 10 Oktober 1950, Ibnu Hajar memproklamasikan berdirinya DI/TII di Kalimantan Selatan. Untuk memperkuat kedudukannya, Ibnu Hajar membentuk kesatuan komando yang dinamakan Kesatuan Rakyat Tertindas. Aktivitas kesatuan ini melakukan pengacauan dan terror kepada rakyat Banjarmasin dan sekitarnya. Untuk memadamkan pemberontakan Ibnu Hajar itu, pemerintah menempuh 2 upaya yaitu upaya damai dan operasi militer. Ketika upaya damai dilakukan, pemerintah berhasil mengajak Ibnu Hajar dan kawan-kawan menghentikan petualangannya dan kembali dalam kesatuan TNI. Namun, setelah bergabung dan mendapat kembali persenjataan kembali akhirnya Ibnu Hajar kembali melakukan petualangannya. Kemudian, pemerintah melakukan operasi militer dengan mengirim kesatuan-kesatuan TNI siap tempur. Pada tahun 1959, Ibnu Hajar dapat

dibekuk dan diajukan ke Mahkamah Militer untuk diadili. Tanggal 22 Maret 1965 dia di hukum mati.

D. Gerakan DI/TI di Sulawesi Selatan

Di Sulawesi Selatan , gerakan Di/TII di pelopori oleh Kahar Muzakar. Penyebab utama terjadinya gerakan DI/TII ini adalah hasrat yang kuat untuk menempatkan lascar-laskar rakyat di Sulawesi Selatan ke dalam APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia) dan cita-citanya untuk menjadi pemimpin APRIS di Sulawesi Selatan. Padahal dulu Kahar Muzakar sangat aktif berjuang dalam kemerdekaan dan berjasa sebagai komandan TRI Persiapan Resimen Hasanudin. Namun, setelah perang selesai, dia ditugaskan untuk memimpin lascar-laskar rakyat di Sulawesi Selatan dan membentuk KGSS (Komando Gerilya Sulawesi Selatan). Dalam memenuhi hasratnya itu, Kahar Muzakar pada tanggal 30 April 1950 mengirim surat kepada pemerintah pusat yang intinya meminta agar semua pasukan KGSS digabungkan dalam lingkungan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) dengan nama Brigade Hasanudin. Karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota-anggota APRIS maka permintaannya di tolak.

Untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari permohonan Kahar Muzakar tersebut, pemerintah dan pemimpin APRIS mengeluarkan kebijaksanaan dengan memasukkan semua anggota KGSS ke dalam Korp Cadangan Militer dan Kahar Muzakar pun diberi pangkat sebagai Letnan Kolonel. Namun, ternyata hal itu tidak diterima oleh Kahar Muzakar. Tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar bersama anak buahnya melarikan diri ke dalam hutan dengan membawa persenjataan militer. Pada tahun 1952, ia memproklamasikan berdirinya NII di Sulawesi Selatan. Pemerintah memutuskan untuk menumpas pemberontakan itu. Berkat upaya yang gigih dari TNI, akhirnya pada bulan Februari 1965 Kahar Muzakar dapat ditembak mati. Di samping itu , orannng kedua dari Kahar Muzakar yaitu Gerungan, pada bulan Juli 1965 berhasil ditangkap. Dengan ini maka berakhirilah Di/TII di Sulawesi Selatan.

E. Gerakan DI/TI di Aceh

Tokoh gerakan Di/TII di Aceh adalah Daud Beureuh. Adapun yang melatarbelakangi terjadinya gerakan DI/TII di Aceh tersebut bermula dari diubahnya status Daerah Istimewa Aceh menjadi sebuah keresidenan dari Provinsi Sumatra Utara. Oleh karena itu mereka menuntut kepada pemerintah pusat agar Aceh dijadikan sebuah provinsi. Tuntutan ini ditolak oleh pemerintah pusat. Daud Beureuh dan kawan-kawan merasa kecewa dan merasa bahwa pemerintah tidak menghargai jerih payah rakyat Aceh semasa kemerdekaan. Maka pada tanggal 20 September 1955, Daud Beureuh memproklamasikan berdirinya NII. Setelah memproklamasikan berdirinya NII atau DI/TII di Aceh, ia segera menguasai daerah-daerah penting di Aceh. Untuk menghentikan petualangan DI/TII tersebut, pemerintah menjalankan operasi militer. Namun, karena kuatnya pengaruh Daud Beureuh, operasi militer tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu pemerintah kembali melakukan upaya baru, yaitu diplomasi dan musyawarah.

Panglima Kodam I/ Iskandar Muda Kolonel Mohammad Yasin memprakarsai Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, yang mempertemukan Daud Beureuh, tokoh-tokoh ulama Aceh, dan pemerintah. Dari musyawarah itu, Daud Beureuh menyadari kesalahannya. Dengan demikian berakhirlah pemberontakan Di/TII di Aceh.

2. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil

Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pada dasarnya merupakan ikhtiar Belanda untuk tetap mempertahankan kedudukan sebagai penjajah di Indonesia. Pemimpin APRA adalah seorang kapten Belanda yang dulu diterjunkan tentara sekutu di Medan pada tahun 1945, yaitu Westerling. Para anggotanya adalah KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger) yaitu tentara Belanda yang berasal dari orang-orang pribumi dan KL (Koninklijk Leger).

Bekas anggota KNIL dan KL banyak yang menjadi anggota gerombolan APRA karena mereka enggan untuk bergabung dalam APRIS. Mereka beranggapan, apabila digabungkan dalam APRIS, mereka akan menjadi tentara nomer dua atau — dianak tirikan oleh pemerintah RIS.

Dengan memanfaatkan situasi ini, Kapten Westerling membentuk sebuah gerombolan yang dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Tujuan utama gerakan APRA adalah mempertahankan bentuk federal di Indonesia serta mempertahankan adanya tentara tersendiri di dalam Negara federal (Negara bagian itu). Aksi pertama yang dijalankan APRA adalah menyerbu kota Bandung pada tanggal 23 Januari 1950 dan menduduki Markas Staf Kwartir Divisi Siliwangi. Karena serangan yang begitu tiba-tiba ini, pasukan TNI Siliwangi kelabakan. Salah satu perwira TNI Siliwangi, Letnan Kolonel Lembong gugur dalam pertempuran ini. Untuk membebaskan kota Bandung, Markas besar APRI di Jakarta segera mengirimkan bantuannya. Di samping itu, dilakukan perundingan antara Perdana Menteri RIS Moh.Hatta dan para komisaris tinggi Belanda untuk menghentikan aksi APRA tersebut. Mayor Jendral Engels mendesak Westerling untuk meninggalkan kota Bandung.

Setelah aksinya di Bandung cukup berhasil, pasukan APRA merencanakan menyerang kota Jakarta dan membunuh menteri-menteri RIS, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr.Ali Budiarjo dan Kolonel TB. Simatupang pada tanggal 26 Januari 1950. APRA berkerjasama dengan seorang menteri yang bernama Sultan Hamid II. Hal itu ternyata sudah diketahui terlebih dahulu oleh pasukan TNI yang berada di Jakarta. Karena kesiapan para pasukan TNI tersebut maka banyak anggota APRA yang terbunuh dan melarikan diri. Mengetahui hal tersebut, Westerling pun segera melarikan diri ke Singapura dengan menumpang pesawat Catalina milik angkatan laut Belanda. Namun, sesampainya di Singapura Westerling di tangkap oleh polisi Singapura dengan alasan masuk ke Negara orang lain tanpa izin. Pemerintah RIS meminta pemerintah Inggris yang berkuasa di Singapura untuk menyerahkan Westerling pada RIS, tetapi pemerintah Inggris menolak karena sebelumnya Indonesia belum melakukan perjanjian ekstradisi dengan Inggris. Demikian pula dengan Sultan Hamid II, pada tanggal 5 April 1950 ia ditangkap oleh TNI. Dengan itu gerakan APRA pun berakhir.

3. Pemberontakan Andi Aziz

Di Makasar terjadi masalah seperti di Bandung, bekas KNIL menolak pasukan APRIS dan menghalangi datangnya TNI ke Makassar yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz yang merupakan perwira KNIL yang baru diterima ke dalam APRIS. Pada tanggal 30 Maret ia bersama dengan pasukan KNIL yang lain menggabungkan diri ke dalam APRIS dihadapan Letkol A.J Mokoginta, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Pada waktu itu keadaan Makasar tidak tenang karena rakyat yg anti federal mengadakan demonstrasi sebagai desakan agar NIT secepatnya bergabung dengan RI. Sedangkan sebagian dari mereka setuju dengan system federal juga mengadakan demonstrasi, sehingga ketegangan mulai bertambah.

Pada tanggal 5 April 1950 terdengar berita bahwa pemerintah RIS mengirimkan 900 pasukan APRIS dari TNI ke Makasar untuk menjaga keamanan. Kesatuan ini dipimpin oleh Mayor Worang diangkut dengan 2 buah kapal dan sudah berlabuh di luar pelabuhan Makasar. Berita ini mengkhawatirkan bekas anggota KNIL yang takut terdesak oleh pasukan baru, mereka menamakan diri pasukan Bebas dan dipimpin oleh Andi Aziz. Pada jam 5 pagi Andi Aziz dan pasukannya menyerang markas TNI di Makasar. Dalam waktu singkat kota Makasar berhasil dikuasai oleh gerombolan penyerbu karena kurangnya asukan dari TNI. Beberapa orang TNI ditawan dan Kolonel A.J Mokoginta ditawan. Pada tanggal 5 April Perdana Menteri NIT Ir. P.D. Diapari mengundurkan diri karena tidak setuju dengan tindakan Andi Aziz. Pemerintah kemudian dipegang oleh kabinet baru yang pro RI dibawah pimpinan Mr. Putuhena dan pada tanggal 21 April, Sukawati wakil dari negara NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia melebur ke dalam negara kesatuan RI bila RI juga melaksanakan tindakan yang sama. Selain itu pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum pada tanggal 8 April yang menginstruksikan agar Andi Aziz dalam waktu 4x24 jam atang melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menyerahkan senjata-senjata dan juga tawannya. Andi Aziz terlambat melaporkan diri ke Jakarta dan karenanya ditangkap sebagai pemberontak dan diadili. Pada waktu yang bersamaan dikirimkan sebuah pasukan ekspedisi ke Sulawesi dibawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Pasukan Worang kemudian mulai bergerak ke arah Makasar dan pada tanggal 21 April berhasil memasuki Makasar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontak. Andi Aziz sendiri pada tanggal 15 April telah berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden NIT Sukowati.

Pada tanggal 26 April pasukan ekspedisi di bawah Kolonel Kawilarang sampai di Sulawesi Selatan. Bentrokan senjata masih terjadi dan pada tanggal 8 Agustus pihak KL-KNIL minta berunding dan perundingan diadakan antara Jendral Scheffelar dari KL-KNIL dengan Kolonel Kawilarang. Hasil dari perundingan ini adalah bahwa kedua belah pihak setuju dihentikannya tembak menembak dan dalam waktu dua hari pasukan KL-KNIL akan meninggalkan Makasar.

4. Republik Maluku Selatan

Di Maluku banyak anggota KNIL. Mereka juga tidak mau dimasukkan ke dalam APRIS. Keresahan KNIL itu dipergunakan oleh tokoh-tokoh pro Belanda, seperti Manusama. Ia mengemukakan gagasan supaya Maluku terpisah dari RIS dan menjadi Negara Merdeka, yang diberi nama Republik Maluku Selatan. Pada bulan April 1950 diproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan. Mr.Dr. Christian Robert Steven Saumokil bekas Jaksa Agung NIT dipilih menjadi presiden RMS. Saumokil sebenarnya sudah terlibat dalam peristiwa Andi Aziz di Makassar, tetapi karena Andi Aziz mengalami kegagalan maka Saumokil mengalihkan usahanya ke Maluku Selatan. Pada waktu keadaan di Ambon sedang kacau karena banyak anggota KNIL yang bergabung dengan TNI, hal tersebut tidak disukai oleh Belanda karena RI akan menjadi lebih kuat. Untuk mencegah hal tersebut maka Belanda mulai menghasut dan menyebarkan desas-desus yang buruk tentang TNI dan RI. Keadaan ini sangat menguntungkan Saumokil dan pada tanggal 25 April 1950 dia memproklamasikan berdirinya —Republik Maluku Selatan

Pemerintah RIS berusaha mengatasi masalah tersebut dengan cara damai yaitu dengan mengirimkan dr. Leimena. Tetapi misi damai tersebut ditolak oleh Saumokil bahkan mereka meminta bantuan, perhatian dan pengakuan dari luar terutama dari Amerika Serikat, Belanda dan juga Dewan PBB. Karena itu maka pemerintah RIS terpaksa menumpas petualangan Saumokil dengan kekuatan senjata. Pada tanggal 14 Juli pasukan ekspedisi APRIS dibawah pimpinan

Kolonel Kawilarang mendarat dan dapat merebut pos-pos penting di pulau Buru. Pendaratan dilakukan di pulau Seram Barat pada tanggal 19 Juli 1950 dan dengan mudah Seram Barat dapat dikuasai oleh APRIS/TNI. RMS berupaya memusatkan kekuatan dan kekuasaannya di pulau Seram dan Ambon.

Operasi pasukan APRIS/TNI mengalami kesulitan sehingga pada bulan Desember 1950 Seram dan Ambon dapat dikuasai. Dan ketika RIS pada tanggal 17 Agustus 1950 dilebur dan menjadi Negara kesatuan RI, RMS belum bisa ditumpas seluruhnya. Salah satu tokoh dari TNI yaitu Letnan Kolonel Slamet Riyad gugur dalam pertempuran sewaktu menyerang benteng Victoria di Ambon. Operasi APRIS dilakukan dari pulau ke pulau dan menghancurkan pasukan RMS. Serdadu-serdadu RMS melarikan diri ke hutan – hutan dan pada bulan Desember 1963 Maluku dapat diamankan kembali setelah Dr. Saumokil tertangkap.

5. Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta)

Gerakan ini muncul di tengah keadaan politik yang sedang tidak stabil dalam pemerintahan. Hubungan yang tidak mesra antara pemerintah pusat dengan beberapa daerah menjadi salah satu pemicu timbulnya gerakan ini. Keadaan itu disebabkan oleh ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatra dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Dan rasa tidak puas tersebut didukung oleh beberapa panglima besar TNI. Beberapa panglima militer membantu dewan-dewan daerah seperti :

- Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dibentuk oleh Letkol Ahmad Husein, 20 Desember 1956
- Dewan Gajah di Medan yang dibentuk oleh Kolonel Simbolon, 22 Desember 1956
- Dewan Garuda di Sumatra Selatan
- Dewan Manguni di Manado yang dibentuk oleh Letkol Ventje Sumual, 18 Februari 1957

Gerakan tersebut akhirnya berkembang menjadi suatu gerakan terbuka yang terkenal sebagai gerakan PRRI/Permesta. Pada tanggal 10 Februari 1958 Ahmad Husein mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat yang menyatakan bahwa kabinet Djuanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5x24 jam. Menerima ultimatum tersebut pemerintah bertindak tegas dengan memberhentikan secara tidak hormat Ahmad Huesin, Mauludin Simbolon, Zulkifli Lubis dan Dahlan Djambak dari kedudukannya sebagai perwira TNI. Pada tanggal 12 Februari 1958 A.H Nasution mengeluarkan perintah untuk membekukan Komando Daerah Militer Sumatra Tengah. Dan pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Husein memproklamasikan berdirinya PRRI di Padang dan Syarifudin Prawiranegara sebagai perdana mentrinya. Pemerintah melancarkan operasi militer gabungan yang dinamakan Operasi 17 Agustus, operasi ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan negara, menghancurkan gerakan separatis, mencegah meluasnya gerakan tersebut dan untuk mencegah ikut campurnya kekuatan- kekuatan asing.

Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) pertama kali ditujukan ke Pekanbaru untuk melindungi dan mengamankan sumber-sumber minyak yang ada. Dan operasi ini dikembangkan ke pusat pemberontak di Bukittinggi. Proklamasi PRRI yang diumumkan pada tanggal 15 Februari 1958 mendapat sambutan dari Indonesia Timur. Dalam rapat raksasa yang digelar di beberapa tempat di daerah Komanado Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah, Kolonel D.J. Somba mengeluarkan pernyataan bahwa pada tanggal 17 Februari 1958 daerah tersebut

memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat serta mendukung PRRI. Untuk menghadapi kekuatan Permesta, pemerintah melancarkan Operasi Sapta Marga pada bulan April 1958. Ternyata gerakan Permestamendapat bantuan dari pihak asing. Terbukti dengan tertembak jatuhnya pesawat asing yang dikemudikan oleh A.L Pope seorang warga negara Amerika Serikat pada tanggal 18 Mei 1958 di Ambon. Dan gerakan Permesta baru dapat dilumpuhkan sekitar bulan Agustus 1958 dan sisa-siasanya dapta dittumpas secara keseluruhan tahun 1961.

6. Peristiwa PKI Madiun

A. Latar Belakang Pemberontakan.

Pemberontakan PKI di Madiun tidak bisa lepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin tahun 1948, yaitu tandatanganinya perundingan Renville, ternyata perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia. Maka Amir Syarifuddin turun dari kabinetnya dan digantikan oleh Kabinet Hatta. Ia merasa kecewa karena kabinetnya jatuh kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948.

Front Demokrasi Rakyat (FDR) ini didukung oleh Partai Sosialis Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, PKI, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Pada tanggal 11 Agustus 1948, Muso tiba dari Moskow. Semenjak kedatangan Muso bersatulah kekuatan PKI dan FDR dibawah pimpinan Muso dan Amir Syarifuddin.

Kelompok ini seringkali melakukan aksi-aksinya antara lain :

1. Melancarkan propaganda anti pemerintah.
2. Mengadakan pemogokan-pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan misalnya di pabrik karung di Delanggu Klaten.
3. Melakukan pembunuhan-pembunuhan misalnya dalam bentrok senjata di Solo 2 Juli 1948, Komandan Divisi LIV yakni Kolonel Sutarto secara tiba-tiba terbunuh. Pada tanggal 13 September 1948 tokoh pejuang 1945 Dr. Moewardi diculik dan dibunuh.

Gerakan PKI ini mencapai pucaknya pada tanggal 18 September 1948. PKI dibawah pimpinan Muso dan Amir Syarifuddin melancarkan pemberontakan yang dipusatkan di Madiun dan sekitarnya. Banyak pejabat pemerintah dan tokoh agama diculik dan dibunuh secara sadis. Mereka dibantai oleh orang-orang PKI di soko Gorang Gareng (Magetan) dan Kresek (Madiun). Muso-Amir Syarifuddin kemudian memproklamasikan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia.

Susunan pemerintah Negara Republik Soviet Indonesia adalah :

Kepala Negara : Muso

Kepala Pemerintahan : Amir Syarifuddin.

Panglima Angkatan Perang : Kol. Joko Suyono.

Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun.

Penumpasan PKI Madiun

Presiden Soekarno dan perdana menteri M.Hatta mengutuk keras pemberontakan PKI di Madiun. Pemerintah segera meluncurkan operasi penumpasan dengan GOM (Gerakan Operasi Militer). Panglima Jendral Soedirman kemudian mengeluarkan perintah harian yang isinya antara lain menunjuk Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono Gubernur Militer Jawa Timur diperintahkan untuk memimpin dan menggerakkan pasukan untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun dan sekitarnya.

Pasukan Siliwangi digerakkan dari Jawa Tengah. Brigade mobil dan Gabungan Divisi Jawa Timur digerakkan dari Jawa Timur. Pada tanggal 10 September 1948 keadaan Madiun segera dapat dikendalikan oleh pemerintah Indonesia. Muso tewas diponorogo, Amir Syarifuddin tertangkap di Purwodadi.

7. G30SPKI (Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia)

Gerakan 30 September (dahulu juga disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI), Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 di saat tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.

Latar Belakang

Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.

Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer

ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.

Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

Angkatan kelima

Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis chung, penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S. Pada awal tahun 1965 Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran perdana menteri RRC, mempunyai ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan "kepentingan bersama" polisi dan "rakyat". Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi". Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "massa tentara" subjek karya-karya mereka. Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah. Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun (milik negara = milik bersama). Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolsevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat.

Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jendral-jendral tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Sukarno disamakan dengan setingkat menteri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya (Menpangab, Menpangad, dan lain-lain). Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis "rakyat". Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang "perasaan kebersamaan

dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis". Rezim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM. Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rezim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian "angkatan kelima" di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan jendral-jendral militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa "NASAKOMisasi" angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerjasama untuk menciptakan "angkatan kelima". Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.

Isu sakitnya Bung Karno

Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja, jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut.

Isu masalah tanah dan bagi hasil

Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UU Bagi Hasil) yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada namun pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA, melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai 'aksi sepihak' dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya.

Keributan antara PKI dan Islam (tidak hanya NU, tapi juga dengan Persis dan Muhammadiyah) itu pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di provinsi-provinsi lain juga terjadi hal demikian, PKI di beberapa tempat bahkan sudah mengancam kyai-kyai bahwa mereka akan disembelih setelah tanggal 30 September 1965 (hal ini membuktikan bahwa seluruh elemen PKI mengetahui rencana kudeta 30 September tersebut).

Peristiwa

Pada 1 Oktober 1965 dini hari, enam jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana (Cakrabirawa) yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol. Untung. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut.

Isu Dewan Jenderal

Pada saat-saat yang genting sekitar bulan September 1965 muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili oleh Soekarno. Namun yang tidak diduga-duga, dalam operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut, terjadi tindakan beberapa oknum yang termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani, Panjaitan, dan Harjono.

Isu Keterlibatan Soeharto

Hingga saat ini tidak ada bukti keterlibatan/peran aktif Soeharto dalam aksi penculikan tersebut. Satu-satunya bukti yang bisa dielaborasi adalah pertemuan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad (pada zaman itu jabatan Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat tidak membawahi pasukan, berbeda dengan sekarang) dengan Kolonel Abdul Latief di Rumah Sakit Angkatan Darat. Meski demikian, Suharto merupakan pihak yang paling diuntungkan dari peristiwa ini. Banyak penelitian ilmiah yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional mengungkap keterlibatan Suharto dan CIA. Beberapa diantaranya adalah, Cornell Paper, karya Benedict R.O'G. Anderson and Ruth T. McVey (Cornell University), Ralph McGehee (The Indonesian Massacres and the CIA), Government Printing Office of the US (Department of State, INR/IL Historical Files, Indonesia, 1963-1965. Secret; Priority; Roger Channel; Special Handling), John Roosa (Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia), Prof. Dr. W.F. Wertheim (Serpihan Sejarah Th65 yang Terlupakan).

Korban

Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah:

Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi)

Mayjen TNI Raden Suprpto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi)

Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan)

Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)

Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik)

Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)

Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi sasaran utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan dia, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.

Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober. Selain itu beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban:

Bripka Karel Satsuit Tubun (Pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II dr.J. Leimena)

Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)
Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kepala Staf Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta).

Penangkapan dan Pembantaian

Dalam bulan-bulan setelah peristiwa ini, semua anggota dan pendukung PKI, atau mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI, semua partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kamp-kamp tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah (bulan Oktober), Jawa Timur (bulan November) dan Bali (bulan Desember). Berapa jumlah orang yang dibantai tidak diketahui dengan persis - perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang, sementara perkiraan lain menyebut dua sampai tiga juta orang. Namun diduga setidaknya-tidaknya satu juta orang menjadi korban dalam bencana enam bulan yang mengikuti kudeta itu. Dihasut dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi muslim sayap-kanan seperti barisan Ansor NU dan Tameng Marhaenis PNI melakukan pembunuhan-pembunuhan massal, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada laporan-laporan bahwa Sungai Brantas di dekat Surabaya menjadi penuh mayat-mayat sampai di tempat-tempat tertentu sungai itu "terbendung mayat".

Pada akhir 1965, antara 500.000 dan satu juta anggota-anggota dan pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi, tanpa adanya perlawanan sama sekali. Sewaktu regu-regu militer yang didukung dana CIA ^[1] menangkap semua anggota dan pendukung PKI yang terketahui dan melakukan pembantaian keji terhadap mereka, majalah "Time" memberitakan:

"Pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan dalam skala yang sedemikian sehingga pembuangan mayat menyebabkan persoalan sanitasi yang serius di Sumatera Utara, di mana udara yang lembap membawa bau mayat membusuk. Orang-orang dari daerah-daerah ini bercerita kepada kita tentang sungai-sungai kecil yang benar-benar terbungkus oleh mayat-mayat. Transportasi sungai menjadi terhambat secara serius."

Di pulau Bali, yang sebelum itu dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit 3500 orang menjadi korban di permulaan 1966. Di sana para Tamin, pasukan komando elite Partai Nasional Indonesia, adalah pelaku pembunuhan-pembunuhan ini. Koresponden khusus dari Frankfurter Allgemeine Zeitung bercerita tentang mayat-mayat di pinggir jalan atau dibuang ke dalam galian-galian dan tentang desa-desa yang separuh dibakar di mana para petani tidak berani meninggalkan kerangka-kerangka rumah mereka yang sudah hangus. Di daerah-daerah lain, para terdakwa dipaksa untuk membunuh teman-teman mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka. Di kota-kota besar pemburuan-pemburuan rasialis "anti-Tionghoa" terjadi. Pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai pemerintah yang mengadakan aksi mogok sebagai protes atas kejadian-kejadian kontra-

revolusioner ini dipecat. Paling sedikit 250,000 orang pekerja dan petani dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi. Diperkirakan sekitar 110,000 orang masih dipenjarakan sebagai tahanan politik pada akhir 1969. Eksekusi-eksekusi masih dilakukan sampai sekarang, termasuk belasan orang sejak tahun 1980-an. Empat tapol, **Johannes Surono Hadiwiyo, Safar Suryanto, Simon Petrus Sulaeman** dan **Nobertus Rohayan**, dihukum mati hampir 25 tahun sejak kudeta itu.

SUPERSEMAR

Lima bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Sukarno memberi Suharto kekuasaan tak terbatas melalui Surat Perintah Sebelas Maret. Ia memerintah Suharto untuk mengambil "langkah-langkah yang sesuai" untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh Suharto untuk melarang PKI. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Sukarno dipertahankan sebagai presiden tituler diktatur militer itu sampai Maret 1967.

Kepemimpinan PKI terus mengimbau massa agar menuruti kewenangan rejim Sukarno-Suharto. Aidit, yang telah melarikan diri, ditangkap dan dibunuh oleh TNI pada tanggal 24 November, tetapi pekerjaannya diteruskan oleh Sekretaris Kedua PKI Nyoto.

Peringatan

Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September (G-30-S/PKI). Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pada masa pemerintahan Soeharto, biasanya sebuah film mengenai kejadian tersebut juga ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia setiap tahun pada tanggal 30 September. Selain itu pada masa Soeharto biasanya dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dan dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalibata. Namun sejak era Reformasi bergulir, film itu sudah tidak ditayangkan lagi dan hanya tradisi tabur bunga yang dilanjutkan.

Pada 29 September - 4 Oktober 2006, para eks pendukung PKI mengadakan rangkaian acara peringatan untuk mengenang peristiwa pembunuhan terhadap ratusan ribu hingga jutaan jiwa di berbagai pelosok Indonesia. Acara yang bertajuk "Pekan Seni Budaya dalam rangka memperingati 40 tahun tragedi kemanusiaan 1965" ini berlangsung di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok. Selain civitas academica Universitas Indonesia, acara itu juga dihadiri para korban tragedi kemanusiaan 1965, antara lain Setiadi, Murad Aidit, Haryo Sasongko, dan Putmainah.

BAB VI

Peran tokoh nasional dan daerah yang berjuang mempertahankan Kemerdekaan

1. Soekarno

Dr.(HC) Ir. H. Soekarno¹ (ER, EYD: Sukarno, nama lahir: Koesno Sosrodihardjo) (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901 – meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun) adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945–1966. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya.

Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang kontroversial, yang isinya—berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat—menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggungjawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 1967, Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada Sidang Istimewa MPRS pada tahun yang sama dan Soeharto menggantikannya sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.

2. Moh Hatta

Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi. Di kota Bung Hatta dibesarkan di lingkungan keluarga ibunya. Sejak duduk di MULO di kota Padang, ia telah tertarik pada pergerakan. Hatta masuk ke perkumpulan Jong Sumatranen Bond. Tahun 1921 Hatta tiba di Negeri Belanda untuk belajar di Handels Hoge School Rotterdam. Ia mendaftar pada Indische Vereniging. Perkumpulan yang menolak bekerja sama dengan Belanda itu kemudian berganti nama lagi menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Koran Hindia Poetra, terbit & pada tahun 1924 majalah ini berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Hatta lulus dalam ujian handels economie (ekonomi perdagangan) pada tahun 1923.

Perpanjangan rencana studinya itu memungkinkan Hatta terpilih menjadi Ketua PI pada tanggal 17 Januari 1926. Pada kesempatan itu, ia berpidato tentang Struktur Ekonomi Dunia & Pertentangan Kekuasaan. Dia mencoba menganalisis struktur ekonomi dunia dan berdasarkan itu, menunjuk landasan kebijaksanaan non-kooperatif.

Di bawah kepemimpinannya, PI berkembang menjadi organisasi politik yang mempengaruhi jalannya politik rakyat di Indonesia. Pada tahun 1926, Hatta memimpin delegasi ke Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Bierville, Prancis.

Dengan Nazir St. Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Madjid Djojoadingrat, Hatta dipenjara selama lima setengah bulan. Pada tanggal 22 Maret 1928, mahkamah pengadilan di Den Haag membebaskan keempatnya dari segala tuduhan. Dalam sidang bersejarah, Hatta mengemukakan pidato pembelaan yg mengagumkan yakni —Indonesia Vrijl atw "Indonesia Merdeka".

Pada bulan Juli 1932, Hatta berhasil menyelesaikan studinya di Negeri Belanda dan sebulan kemudian ia tiba di Jakarta. Antara akhir tahun 1932 & 1933, kesibukan utama Hatta adalah menulis berbagai artikel politik dan ekonomi untuk Daulat Rakjat. Para pimpinan Partai Pendidikan Nasional Indonesia ditahan dan kemudian dibuang ke Boven Digoel salah satunya Hatta. Sebelum dibuang, Di penjara Glodok, Hatta menulis buku berjudul Krisis Ekonomi dan Kapitalisme.

Dalam pembuangan, Hatta secara teratur menulis artikel-artikel untuk surat kabar

Pemandangan. Di pembuangan Hatta membukukan tulisanya —Pengantar ke Jalan Ilmu dan

Pengetahuan dan —Alam Pikiran Yunani. (empat jilid).

9 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang & 22 Maret 1942 Hatta dan Sjahrir dibawa ke Jakarta. Pidato yang diucapkan Hatta di Lapangan Ikada pada tanggal 8 Desember 1942 menggemparkan banyak kalangan. Ia mengatakan, Indonesia terlepas dari penjajahan imperialisme Belanda. Oleh karena itu ia tak ingin menjadi jajahan kembali. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk, dengan Soekarno sebagai Ketua dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua. 16 Agustus 1945 malam, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempersiapkan proklamasi dalam rapat di rumah Admiral Maeda. Soekarno meminta Hatta menyusun teks proklamasi yang ringkas dengan menuliskan kata-kata yang didiktekannya. 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia.

3. Sultan Hamengkubono IX

Lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat, 12 April 1912 – meninggal di Washington, DC, Amerika Serikat, 2 Oktober 1988 pada umur 76 tahun. Ia adalah salah seorang Sultan yang pernah memimpin di Kasultanan Yogyakarta (1940-1988) dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973-1978. Ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka

Indonesia, dan pernah menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Peranan Sultan Hamengkubuwana IX dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 oleh TNI masih tidak sinkron dengan versi Soeharto. Menurut Sultan, ialah yang melihat semangat juang rakyat melemah dan menganjurkan serangan umum. Sedangkan menurut Pak Harto, ia baru bertemu Sultan malah setelah penyerahan kedaulatan. Sultan menggunakan dana pribadinya (dari istana Yogyakarta) untuk membayar gaji pegawai republik yang tidak mendapat gaji semenjak Agresi Militer ke-2.

Sejak 1946 ia pernah beberapa kali menjabat menteri pada kabinet yang dipimpin Presiden Soekarno. Jabatan resminya pada tahun 1966 adalah ialah Menteri Utama di bidang Ekuin. Pada tahun 1973 ia diangkat sebagai wakil presiden. Pada akhir masa jabatannya pada tahun 1978, ia menolak untuk dipilih kembali sebagai wakil presiden dengan alasan kesehatan. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa alasan sebenarnya ia mundur adalah karena tak menyukai Presiden Soeharto yang represif seperti pada Peristiwa Malari dan hanyut pada KKN. Ia ikut menghadiri perayaan 50 tahun kekuasaan Ratu Wilhelmina di Amsterdam, Belanda pada tahun 1938.

Minggu malam 2 Oktober 1988, ia wafat di George Washington University Medical Centre, Amerika Serikat dan dimakamkan di pemakaman para sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Indonesia.

Sultan Hamengku Buwana IX tercatat sebagai Gubernur terlama yang menjabat di Indonesia antara 1945-1988 dan Raja Kesultanan Yogyakarta terlama antara 1940-1988. Perkembangan Kehidupan Politik ,Sosial ,Ekonomi pada masa demokrasi Liberal

Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya parta-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI & Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. Sering bergantinya kabinet sering menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Ciri-ciri demokrasi liberal adalah sebagai berikut :

1. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat
2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah
3. Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR
4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden

4. Sudirman

Jenderal Besar Raden **Soedirman** (EYD: **Sudirman**; lahir 24 Januari 1916 – meninggal 29 Januari 1950 pada umur 34 tahun^[a]) adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Menjadi panglima besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia secara luas terus dihormati di Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Hindia Belanda, Soedirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priyayi. Setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada tahun 1916, Soedirman tumbuh menjadi seorang siswa rajin; ia sangat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk mengikuti program kepanduan yang dijalankan oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Saat di sekolah menengah, Soedirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi, dan dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah keguruan, pada 1936 ia mulai bekerja sebagai seorang guru, dan kemudian menjadi kepala sekolah, di sekolah dasar Muhammadiyah; ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin Kelompok Pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Soedirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang disponsori Jepang, menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Soedirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan, namun kemudian diasingkan ke Bogor.

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soedirman melarikan diri dari pusat penahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas, yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu dijadikan bagian dari Divisi V pada 20 Oktober oleh panglima sementara Oerip Soemohardjo, dan Soedirman bertanggung jawab atas divisi tersebut. Pada tanggal 12 November 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan panglima besar TKR di Yogyakarta, Soedirman terpilih menjadi panglima besar, sedangkan Oerip, yang telah aktif di militer sebelum Soedirman lahir, menjadi kepala staff. Sembari menunggu pengangkatan, Soedirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Pertempuran ini dan penarikan diri tentara Inggris menyebabkan semakin kuatnya dukungan rakyat terhadap Soedirman, dan ia akhirnya diangkat sebagai panglima besar pada tanggal 18 Desember. Selama tiga tahun berikutnya, Soedirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati –yang turut disusun oleh Soedirman – dan kemudian Perjanjian Renville –yang menyebabkan Indonesia harus mengembalikan wilayah yang diambilnya dalam Agresi Militer I kepada Belanda dan penarikan 35.000 tentara Indonesia. Ia juga menghadapi pemberontakan dari dalam, termasuk upaya kudeta pada 1948. Ia kemudian menyalahkan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai penyebab penyakit tuberkulosis-nya; karena infeksi tersebut, paru-paru kanannya dikempeskan pada bulan November 1948.

Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Soedirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan Agresi Militer II untuk menduduki Yogyakarta. Di saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di kraton sultan, Soedirman, beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama tujuh bulan. Awalnya mereka diikuti oleh pasukan Belanda, tetapi Soedirman dan pasukannya berhasil kabur dan mendirikan markas sementara di Sobo, di dekat Gunung Lawu. Dari tempat ini, ia mampu mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Ketika Belanda mulai menarik diri, Soedirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Penyakit TBC yang diidapnya kambuh; ia pensiun dan pindah ke Magelang. Soedirman wafat kurang lebih satu bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta.

Kematian Soedirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakaman. Soedirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia. Perlawanan gerilyanya ditetapkan sebagai sarana pengembangan esprit de corps bagi tentara Indonesia, dan rute gerilya sepanjang 100-kilometre (62 mi) yang ditempuhnya harus diikuti oleh taruna Indonesia sebelum lulus dari Akademi Militer. Soedirman ditampilkan dalam uang kertas rupiah keluaran 1968, dan namanya diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan monumen. Pada tanggal 10 Desember 1964, ia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.

BAB VII

Perkembangan kehidupan politik, sosial dan ekonomi pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal

1. Perubahan system dari presidensial menjadi parlementer

Dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia maka dibentuk BPUPKI, yang telah berhasil membuat Rancangan Dasar Negara pada tanggal 25 Mei s.d. 1 Juni 1945 dan Rancangan

UU Dasar pada tanggal 10 Juli s.d. 17 Juli 1945. Pada tanggal 11 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI yang melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPUPKI dan berhasil membuat UUD 1945 yang mulai diberlakukan tanggal 18 Agustus 1945.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, maka hal-hal yang dilakukan adalah :

- Menetapkan UUD Negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945.
- Menetapkan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- Pembentukan Departemen-Departemen oleh Presiden
- Pengangkatan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden

Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah Sistem Pemerintahan Presidensial (Sistem Kabinet Presidensial), yang bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan adalah Presiden. Menteri-menteri sebagai pembantu Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden adalah Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam kurun waktu berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 telah terjadi "perubahan praktik ketatanegaraan" Republik Indonesia tanpa mengubah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan tersebut ialah dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Dengan keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tersebut terjadi perubahan dari sistem pemerintahan Presidensial (Sistem Kabinet Presidensial) menjadi sistem pemerintahan Parlementer (Sistem Kabinet Parlementer).

Sehingga dengan Maklumat-maklumat tersebut menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pemerintahan mengenai system pemerintahan dimana menurut Pasal 4 UUD 45 ditegaskan bahwa —Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan Pasal 17 menetapkan bahwa

— Menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada

Presiden, sistem pemerintahan menurut UUD 1945 adalah Sistem Presidensial. Sedangkan menurut Maklumat Pemerintah meletakkan pertanggungjawaban Kabinet kepada KNIP yang merupakan ciri dari sistem Parlemen.

2. Kabinet pada masa demokrasi Liberal

Kabinet pada masa Demokrasi Liberal dimulai dengan dibentuknya kabinet Natsir pada tanggal 6 September 1950 hingga dengan berakhirnya kabinet Djuanda yang menjadi titik awal adanya demokrasi terpimpin.

A. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi.

Dipimpin Oleh : Muhammad Natsir

Program :

1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Hasil :

- Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.
- Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan).
- Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.

Berakhirnya kekuasaan kabinet : Adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRD. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

B. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)

Merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI.

Dipimpin Oleh: Sukiman Wiryo Sanjaya

Program :

1. Menjamin keamanan dan ketentraman
2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
3. Mempercepat persiapan pemilihan umum.
4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.

Hasil :

Tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

- ☐ Adanya **Pertukaran Nota** Keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Soebardjo

dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatikan kepentingan Amerika.

Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.

- ☐ Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.
- ☐ Masalah Irian barat belum juga teratasi.
- ☐ Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

C. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam biangnya.

Dipimpin Oleh : Mr. Wilopo

Program :

1. Program dalam negeri : Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.
2. Program luar negeri : Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.
 - ☐ Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.
 - ☐ Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras.
 - ☐ Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.

Terjadi **peristiwa 17 Oktober 1952**. Merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan.

Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu TNI-AD yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Tetapi saran tersebut ditolak.

☐

Muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD.

Inti peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Sukarno agar membubarkan kabinet.

- ☐ Munculnya **peristiwa Tanjung Morawa** mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak

mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh.

Intinya peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

D. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU.

Dipimpin Oleh : Mr. Ali Sastroamijoyo

Program :

1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.
2. Pembebasan Irian Barat secepatnya.
3. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.
4. Penyelesaian Pertikaian politik

- ☐ Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.

- ☐ Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

- ☐ Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.

- ❑ Terjadi **peristiwa 27 Juni 1955** suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya menteri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru.
- ❑ Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan.
- ❑ Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
- ❑ Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

E. KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956) Dipimpin Oleh : Burhanuddin Harahap
Program :

1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru
 3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
 4. Perjuangan pengembalian Irian Barat
 5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.
- ❑ Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

- ❑ Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
- ❑ Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer.
- ❑ Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.
- ❑ Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH

Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinetpun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen yang baru pula.

F. KABINET ALI SASTROAMIJOYO II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU.

Dipimpin Oleh : Ali Sastroamijoyo

Program :

Program kabinet ini disebut **Rencana Pembangunan Lima Tahun** yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut.

1. Perjuangan pengembalian Irian Barat
2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.
3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.
4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan

kepentingan rakyat.

Selain itu program pokoknya adalah,

- ☐ Pembatalan KMB,
- ☐ Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif,
- ☐ Melaksanakan keputusan KAA.

Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB.

- ☐ Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.
- ☐ Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.
- ☐ Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya.
- ☐ Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional.

- Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI

berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

G. KABINET DJUANDA (9 April 1957- 5 Juli 1959)

Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik.

Dipimpin Oleh : Ir. Juanda
Program :

Programnya disebut **Panca Karya** sehingga sering juga disebut sebagai **Kabinet Karya**, programnya yaitu :

- Membentuk Dewan Nasional
- Normalisasi keadaan Republik Indonesia
- Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB
- Perjuangan pengembalian Irian Jaya
- Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan

Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk.

- Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui **Deklarasi Djunda**, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.
 - Terbentuknya **Dewan Nasional** sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.
 - Mengadakan **Musyawarah Nasional** (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI.
 - Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.
- Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.

- Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.
- Terjadi **peristiwa Cikini**, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadiri pesta sekolah tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu **Demokrasi Terpimpin**.

3. Kebijakan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal

Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut.

A. Gunting Syafruddin

Kebijakan ini adalah **Pemotongan nilai uang** (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya.

Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950.

Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar. Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.

B. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya :

- a. Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
- b. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
- c. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
- d. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan

Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program

Modul Sejarah Indonesia ,Elvia Roza, S.Pd, SMK Wikrama Bogor | 139

ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena :

1. Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
2. Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
3. Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
4. Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
5. Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
6. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Dampaknya program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

C. Nasionalisasi De Javasche Bank

Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter.

Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.

D. Sistem Ekonomi Ali-Baba

Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (mentri perekonomian kabinet Ali I). **Tujuan** dari program ini adalah

- ☐ Untuk memajukan pengusaha pribumi.
- ☐ Agar para pengusaha pribumi Bekerjasama memajukan ekonomi nasional.
- ☐ Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
- ☐ Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi.

Ali digambarkan sebagai pengusaha **pribumi** sedangkan **Baba** digambarkan sebagai pengusaha **non pribumi** khususnya Cina.

Pelaksanaan kebijakan Ali-Baba,

1. Pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf.
2. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional

3. Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada.

Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab:

Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.

Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas.

Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.

E. Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan **Finek**, yang berisi :

- Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
- Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
- Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil

langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak.

Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Sukarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB.

Dampaknya :

Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.

F. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.

Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. **Tugas biro** ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.

RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :

- a. Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
- b. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
- c. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

G. Musyawarah Nasional Pembangunan

Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). **Tujuan** diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat

dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja **rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena :**

1. Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.
2. Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.
3. Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.
4. Membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia.
5. Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.
6. Perkembangan kehidupan Politik ,Sosial , Ekonomi pada masa demokrasi terpimpin.

BAB VIII

Latarbelakang Lahirnya Demokrasi Terpimpin

1. Latarbelakang lahirnya demokrasi terpimpin

Diawali dari maklumat Hatta sebagai wakil presiden waktu itu, di mana dalam maklumat tersebut menganjurkan perlunya pembentukan partai-partai, yang ternyata mendapat sambutan luas hingga pada waktu itu lebih kurang 40 partai telah lahir di Indonesia, tetapi pada kenyataannya dalam kondisi yang sedemikian, bukannya menambah suburnya sistem Demokrasi di Indonesia. Buktinya kabinet-kabinet yang ada pada waktu itu tidak pernah bertahan sampai 2 tahun penuh dan terjadi perombakan-perombakan dengan kabinet yang baru, dan bahkan menurut penilaian presiden Soekarno banyaknya partai hanya memperumit masalah dan hanya menjadi penyebab gotok-gotokan, penyebab perpecahan bahkan dalam nadi pidatonya dia menilai partai itu adalah semacam pertunjukan adu kambing yang tidak bakal berpengaruh baik bagi Bangsa dan negara.

Menurut pengamatan Soekarno Demokrasi Liberal tidak semakin mendorong Indonesia mendekati tujuan revolusi yang dicita-citakan, yakni berupa masyarakat adil dan makmur, sehingga pada gilirannya pembangunan ekonomi sulit untuk di majukan, karena setiap pihak baik pegawai negeri dan parpol juga militer saling berebut keuntungan dengan mengorbankan yang lain. Keinginan presiden Soekarno untuk mengubur partai-partai yang ada pada waktu itu tidak jadi dilakukan, namun pembatasan terhadap partai di berlakukan, dengan membiarkan partai politik sebanyak 10 partai tetap bertahan. Yang akhirnya menambah besarnya gejolak baik dari internal partai yang di bubarkan maupun para tokoh-tokoh yang memperjuangkan —Demokrasi liberal— juga daerah-daerah tidak ketinggalan. Dan keadaan yang demikian, akhirnya meaksa Soekarno untuk menerapkan —Demokrasi terpimpin— dengan dukungan militer untuk mengambil alih kekuasaan.

Latar Belakang Munculnya Demokrasi Terpimpin, Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya Demokrasi Terpimpin di Indonesia yaitu,

- a. Kegagalan Badan Konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar Baru. Kegagalan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam anggota konstituante sehingga tidak dapat menghasilkan kesepakatan bersama.
- b. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dengan tujuan menyelamatkan Negara yang berada dalam posisi genting. Isi Dekrit Presiden tersebut yaitu :
 - Pembubaran Badan Konstituante
 - Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
 - Membentuk MPRS dan DPAS

- c. Munculnya gerakan-gerakan separatisme. Gerakan separatisme merupakan gerakan yang ingin mengambil alih kekuasaan secara paksa. Gerakan ini menyebabkan ketidakstabilan politik dalam negeri sehingga mengacaukan keamanan dan juga dapat menyebabkan disintegrasi bangsa atau perpecahan.
- d. Seringnya berganti kabinet yang menimbulkan munculnya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah karena banyak program kerja yang tidak dapat direalisasikan.
- e. Munculnya persaingan yang tidak sehat dan saling menjatuhkan antara sesama partai politik. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik dan perpecahan bangsa.

2. Kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin

Soekarno dengan konsep Demokrasi Terpimpinnya menilai Demokrasi Barat yang bersifat liberal tidak dapat menciptakan kestabilan politik. Menurut Soekarno, penerapan sistem Demokrasi Barat menyebabkan tidak terbentuknya pemerintahan kuat yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Pandangan Soekarno terhadap sistem liberal ini pada akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan partai politik di Indonesia. Partai politik dianggap sebagai sebuah penyakit yang lebih parah daripada perasaan kesukuan dan kedaerahan. Penyakit inilah yang menyebabkan tidak adanya satu kesatuan dalam membangun Indonesia. Partai-partai yang ada pada waktu itu berjumlah sebanyak 40 partai dan ditekan oleh Soekarno untuk dibubarkan. Namun demikian, Demokrasi Terpimpin masih menyisakan sejumlah partai untuk berkembang. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan Soekarno akan keseimbangan kekuatan yang labil dengan kalangan militer. Beberapa partai dapat dimanfaatkan oleh Soekarno untuk dijadikan sebagai penyeimbang.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, parlemen sudah tidak mempunyai kekuatan yang nyata. Sementara itu partai-partai lainnya dihimpun oleh Soekarno dengan menggunakan suatu ikatan kerjasama yang didominasi oleh sebuah ideologi. Dengan demikian partai-partai itu tidak dapat lagi menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok-kelompok yang diwakilinya. Partai politik tidak mempunyai peran besar dalam pentas politik nasional dalam tahun-tahun awal Demokrasi Terpimpin. Partai politik seperti NU dan PNI dapat dikatakan pergerakannya dilumpuhkan karena ditekan oleh presiden yang menuntut agar mereka menyokong apa yang telah dilakukan olehnya. Sebaliknya, golongan komunis memainkan peranan penting dan temperamen yang tinggi. Pada dasarnya sepuluh partai politik yang ada tetap diperkenankan untuk hidup, termasuk NU dan PNI, tetapi semua wajib menyatakan dukungan terhadap gagasan presiden pada segala kesempatan serta mengemukakan ide-ide mereka sendiri dalam suatu bentuk yang sesuai dengan doktrin presiden.

Partai politik dalam pergerakannya tidak boleh bertolak belakang dengan konsepsi Soekarno. Penetapan Presiden (Penpres) adalah senjata Soekarno yang paling ampuh untuk melumpuhkan apa saja yang dinilainya menghalangi jalannya revolusi yang hendak dibawakannya. Demokrasi terpimpin yang dianggapnya mengandung nilai-nilai asli Indonesia dan lebih baik dibandingkan dengan sistem ala Barat, ternyata dalam pelaksanaannya lebih mengarah kepada praktek pemerintahan yang otoriter. Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 1955 yang didalamnya terdiri dari partai-partai pemenang pemilihan umum, dibubarkan. Beberapa partai yang dianggap terlibat dalam pemberontakan sepanjang tahun 1950an, seperti Masyumi dan PSI, juga dibubarkan dengan paksa. Bahkan pada tahun 1961 semua partai politik, kecuali 9 partai yang dianggap dapat menyokong atau dapat dikendalikan, dibubarkan pula.

Dalam penggambaran kiprah partai politik di percaturan politik nasional, maka ada satu partai yang pergerakan serta peranannya begitu dominan yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa itu kekuasaan memang berpusat pada tiga kekuatan yaitu, Soekarno, TNI-Angkatan Darat, dan PKI. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran mengenai kehidupan partai politik pada masa demokrasi terpimpin, pergerakan PKI pada masa ini tidak dapat dilepaskan.

PKI di bawah pemimpin mudanya, antara lain Aidit dan Nyoto, menghimpun massa dengan intensif dan segala cara, baik secara etis maupun tidak. Pergerakan PKI yang sedemikian progresifnya dalam pengumpulan massa membuat PKI menjadi sebuah partai besar pada akhir periode Demokrasi Terpimpin. Pada tahun 1965, telah memiliki tiga juta orang anggota ditambah 17 juta pengikut yang menjadi antek-antek organisasi pendukungnya, sehingga di negara non-komunis, PKI merupakan partai terbesar.

Hubungan antara PKI dan Soekarno sendiri pada masa Demokrasi Terpimpin dapat dikatakan merupakan hubungan timbal balik. PKI memanfaatkan popularitas Soekarno untuk mendapatkan massa. Pada bulan Mei 1963, MPRS mengangkatnya menjadi presiden seumur hidup. Keputusan ini mendapat dukungan dari PKI. Sementara itu di unsur kekuatan lainnya dalam Demokrasi Terpimpin, TNI-Angkatan Darat, melihat perkembangan yang terjadi antara PKI dan Soekarno, dengan curiga. Terlebih pada saat angkatan lain, seperti TNI-Angkatan Udara, mendapatkan dukungan dari Soekarno. Hal ini dianggap sebagai sebuah upaya untuk menyaingi kekuatan TNI-Angkatan Darat dan memecah belah militer untuk dapat ditunggangi. Keretakan hubungan antara Soekarno dengan pemimpin militer pada akhirnya muncul. Keadaan ini dimanfaatkan PKI untuk mencapai tujuan politiknya. Sikap militan yang radikal yang ditunjukkan PKI melalui agitasi dan tekanan-tekanan politiknya yang semakin meningkat, membuat jurang permusuhan yang terjadi semakin melebar. Konflik yang terjadi itu kemudian mencapai puncaknya pada pertengahan bulan September tahun 1965.

Seperti yang telah disebutkan di atas, partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin mengalami pembubaran secara paksa. Pembubaran tersebut pada umumnya dilakukan dengan cara diterapkannya Penerapan Presiden (Penpres) yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 1959. Peraturan tersebut menyangkut persyaratan partai, sebagai berikut:

1. Menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila.
2. Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya.
3. Menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah.
4. Partai-partai harus mempunyai cabang-cabang yang terbesar paling sedikit di seperempat jumlah daerah tingkat I dan jumlah cabang-cabang itu harus sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah daerah tingkat II seluruh wilayah Republik Indonesia.
5. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai.
6. Presiden berhak membubarkan partai, yang programnya diarahkan untuk merongrong politik pemerintah atau yang secara resmi tidak mengutuk anggotanya partai, yang membantu pemberontakan.

Sampai dengan tahun 1961, hanya ada 10 partai yang diakui dan dianggap memenuhi prasyarat di atas. Melalui Keppres No. 128 tahun 1961, partai-partai yang diakui adalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII dan IPKI. Sedangkan Keppres No. 129 tahun 1961 menolak untuk diakui PSII Abikusno, Partai Rakyat Nasional Bebas Daeng Lalo dan partai rakyat nasional Djodi Goondokusumo. Selanjutnya melalui Keppres No. 440 tahun 1961 telah pula diakui Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti).

Demikianlah kehidupan partai-partai politik di masa Demokrasi Terpimpin. Partai-partai tersebut hampir tidak bisa memainkan perannya dalam pentas perpolitikan nasional pada masa itu. Hal ini dimungkinkan antara lain oleh peran Soekarno yang amat dominan dalam menjalankan pemerintahannya dengan cirinya utamanya yang sangat otoriter pada waktu itu di era demokrasi terpimpin.

3. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin

Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin, sebagai awal berlakunya herordering ekonomi. Dimana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Dengan demikian peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando. Sikap dan kemandirian ekonomi (berdikari) menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Masalah pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukannya antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan melakukan sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1000 masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja. Depernas disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Mohammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang. Tugas dewan ini menyusun overall planning yang meliputi bidang ekonomi, kultural dan mental. Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno memberikan pedoman kerja bagi Depernas yang tugas utamanya memberikan isi kepada proklamasi melalui grand strategy, yaitu perencanaan overall dan hubungan pembangunan dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai Pola Pembangunan Semesta Berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Perencanaan ini meliputi perencanaan segala segi pembangunan jasmaniah, rohaniah, teknik, mental, etis dan spiritual berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang tersimpul dalam alam adil dan makmur. Pola Pembangunan Semesta dan Berencana terdiri atas Blueprint tripola, yang meliputi pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan. Pola Proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahap pertama dibuat untuk tahun 1961-1969, proyek ini disingkat dengan Penasbede. Penasbede ini kemudian disetujui oleh MPRS melalui Tap MPRS No. I/MPRS/1960 tanggal 26 Juli 1960 dan diresmikan pelaksanaannya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961. Depernas pada tahun 1963 diganti dengan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bappenas ialah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan dan menilai Mandataris untuk MPRS. Kebijakan sanering yang dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pukul 06.00 pagi. Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Untuk mencapai tujuan itu uang kertas pecahan Rp500 dan Rp1000 yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan itu diturunkan nilainya menjadi Rp50 dan Rp100. Kebijakan ini diikuti dengan kebijakan pembekuan

sebagian simpanan pada bank-bank yang nilainya di atas Rp25.000 dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan keuangan kemudian diakhiri dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6/1959 yang isi pokoknya ialah ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp1000 dan Rp500 yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru yang bernilai Rp100 dan Rp50 sebelum tanggal 1 Januari 1960. Setelah keamanan nasional berhasil dipulihkan, kasus DI Jawa Barat dan pembebasan Irian Barat, pemerintah mulai memikirkan penderitaan rakyatnya dengan melakukan rehabilitasi ekonomi. Konsep rehabilitasi ekonomi disusun oleh tim yang dipimpin oleh Menteri Pertama Ir Djuanda dan hasilnya dikenal dengan sebutan Konsep Djuanda. Namun konsep ini mati sebelum lahir karena mendapat kritikan yang tajam dari PKI karena dianggap bekerja sama dengan negara revisionis, Amerika Serikat dan Yugoslavia. Upaya perbaikan ekonomi lain yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Panitia 13. Anggota panitia ini bukan hanya para ahli ekonomi, namun juga melibatkan para pimpinan partai politik, anggota Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), pimpinan DPR, DPA Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin. Strategi Ekonomi Terpimpin dalam Dekon terdiri dari beberapa tahap; Tahapan pertama, harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. PKI termasuk partai yang menolak melaksanakan Dekon, padahal Aidit terlibat di dalam penyusunannya, selama yang melaksanakannya bukan orang PKI. Empat belas peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dihantam habis-habisan oleh PKI. Djuanda dituduh PKI telah menyerah kepada kaum imperialis. Presiden Soekarno akhirnya menunda pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut pada bulan September 1963 dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar, yang lebih bersifat politis dari pada ekonomi, misalnya pembangunan Monumen Nasional (Monas), pertokoan Sarinah, dan kompleks olahraga Senayan yang dipersiapkan untuk Asian Games IV dan Games Of the New Emerging Forces (Ganefo). Kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah berusaha mendapatkan devisa kredit (kredit impor) jangka panjang yang harus dibayar kembali setelah satu atau dua tahun. Menteri Bank Sentral Yusuf Muda dalam memanfaatkan devisa kredit ini sebagai deferred payment khusus untuk menghimpun dan menggunakan dana revolusi dengan cara melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang memperoleh fasilitas kredit antara Rp250 juta sampai Rp 1 milyar. Perusahaan atau perseorangan itu harus membayar dengan valuta asing dalam jumlah yang sudah ditetapkan. Walaupun cadangan devisa menipis, Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi, karena dana ini digunakan

untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat prestise politik atau mercusuar, dengan mengorbankan ekonomi dalam negeri. Dampak dari kebijakan tersebut ekonomi semakin semrawut dan kenaikan barang mencapai 200-300% pada tahun 1965 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1000 (uang lama) diganti dengan Rp1 (uang baru). Tindakan penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksiaksi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

.

BAB IX

Orde Baru

1. Latarbelakang lahirnya Orde Baru

Orde baru adalah suatu periode setelah orde lama. Latar belakang lahirnya orde baru secara umum adalah karena peristiwa G30SPKI yaitu peristiwa kekacauan terbesar di Indonesia dalam penyimpangan UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu Soekarno mengeluarkan supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang menugaskan Soeharto untuk mengamankan dan memulihkan ketertiban dan stabilitas negara.

Orde baru ini muncul dengan ditandai beberapa peristiwa sebagai berikut :

a. Terjadinya G30SPKI

G30SPKI merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Gerakan ini membuat kondisi ketertiban dan stabilitas di Indonesia menjadi kacau. Soeharto (yang nanti akan menjadi presiden di orde baru) pun diperintahkan untuk menanganinya. Hal ini membuat Soeharto mendapat integritas yang kuat.

b. Keadaan Perekonomian Memburuk

Keadaan Perekonomian yang kian hari kian memburuk , terjadi inflasi sebanyak 6x lipat , kenaikan harga bahan bakar , devlauasi nilai rupiah.

c. Menentang G30SPKI

Rakyat sangat marah terhadap Gerakan 30 September dan mengutuk segala perbuatan yang dilakukan oleh PKI. Rakyat menuntut agar PKI dibubarkan dan tokoh - tokoh PKI dihakimi. Hal ini terjadi karena PKI telah banyak melakukan tindakan – tindakan keji terhadap rakyat.

d. Pembentukan Front Pancasila

Beberapa kesatuan organisasi seperti KAPPI , KAPPI , KAMI , KASI bergabung membentuk Front Pancasila atau Angkatan 66 untuk menghancurkan tokoh G30SPKI.

e. Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura)

Tiga Tuntutan Rakyat atau yang sering dikenal dengan Tritura ini berisi :

- Pembubaran organisasi PKI
- Pembersihan Kabinet Dwikora
- Penurunan harga-harga barang

f. Merosotnya Wibawa Soekarno

Kekuasaan dan wibawa Presiden Soekarno semakin merosot setelah usaha untuk mengadili tokoh yang ikut dalam Gerakan 30 September 1965.

g. TAP MPRS No XXXIII / 1967 MPRS

TAP MPRS No XXXIII / 1967 MPRS ini berisi pencabutan jabatan presiden dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto menjadi presiden. Tanggal 12 Maret 1967 . Soeharto diangkat menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah berlakunya Supersemar , kehidupan berbangsa dan bernegara pun mulai ditata. Dengan dikeluarkannya Supersemar , pemerintah mendapat kepercayaan dari rakyat dan semakin meningkat. Namun setelah itu terjadi masalah dualisme. Soekarno sebagai presiden dan Soeharto menjadi pelaksana pemerintah. Masalah ini membuat Soeharto naik daun apalagi Soekarno menulis surat pengunduran diri dan menyerahkan kekuasaan pada Soeharto. Tanggal 23 Februari 1967 , MPRS mengadakan sidang untuk membicarakan tentang surat pengunduran diri Soekarno dan ingin mengangkat Soeharto menjadi presiden. Akhirnya Soeharto diangkat menjadi presiden pada tanggal 12 Maret 1967 atas dasar TAP MPRS No XXXIII / 1967 MPRS.

2. Kebijakan politik Orde Baru

Masa era orde baru ditandai dengan pelantikan presiden baru pengganti Presiden Soekarno yaitu Jendral Soeharto. Pada saat itu Jendral Soeharto dilantik pada tanggal 12 Maret 1967 sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan pada pemerintah orde barulah penataan kembali tatanan seluruh kehidupan bangsa dan negara serta menjadi titik awal evaluasi terhadap penyelewengan pada masa pemerintahan terdahulu.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kabinet Ampera atau kabinet yang dibuat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dalam menata ulang politik luar negeri, antara lain:

a. Kembalinya Indonesia Menjadi Anggota PBB

Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi salah satu anggota PBB. Dan tercatat sejarah Indonesia menjadi negara ke-60 yang telah bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut. Kebijakan itu pun membuat Indonesia memperoleh banyak manfaat, yaitu:

- ☐ Indonesia mendapatkan sumbangan dari PBB dalam bidang kebudayaan, sosial dan ekonomi.
- ☐ PBB mempunyai andil besar dalam proses kembalinya Irian Barat ke wilayah Indonesia.

- ☐ PBB juga berperan dalam mempercepat pengakuan de jure ataupun de facto kemerdekaan Indonesia di mata dunia.

b. Pemulihan Hubungan Dengan Malaysia

Pada masa orde baru diputuskan untuk memulihkan hubungan dengan Negara Malaysia yang ditetapkan pada ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966. Usaha untuk menjalin hubungan baik dengan Malaysia akhirnya berhasil dicapai dengan pendatanganan Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966. Sebenarnya normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia itu merupakan hasil perundingan di Bangkok (29 Mei hingga 1 Juni 1966).

Perundingan tersebut dikenal dengan Perundingan Bangkok. Dari perundingan tersebut menghasilkan beberapa hal, yaitu:

- ☐ Kedua pemerintahan (Indonesia & Malaysia) menghentikan segala bentuk permusuhan.
- ☐ Persetujuan pemulihan hubungan diplomatik antar kedua negara tersebut.
- ☐ Rakyat Serawak dan Sabah akan diberi kesempatan guna menegaskan kembali keputusan yang telah diambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.

c. Membentuk Sebuah Organisasi Antar Negara Asia Tenggara Yaitu ASEAN

Organisasi ASEAN itu prakarsai lima menteri luar negeri di kawasan Asia Tenggara yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narsisco Ramos dari Filipina, Thanat Khoman dari Thailand dan S. Rajaratnam dari Singapura. Deklarasi ASEAN dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Salah satu tujuan utama didirikannya ASEAN itu untuk bekerja sama secara regional dalam perkembangan kebudayaan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan sosial.

d. Mengikuti berbagai Organisasi Internasional

Indonesia banyak sekali mendapatkan bantuan dana untuk pembangunan. Salah satu organisasi Internasional yang membantu Indonesia yaitu Consultative Group on Indonesia (CGI). Namun sebelum mendapat bantuan dari CGI, Indonesia mendapatkan bantuan terlebih dahulu dari Inter-Governmental Group On Indonesia (IGGI) yang didirikan pada tahun 1967.

Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan jangka panjang dengan bunga yang ringan kepada Negara Indonesia dalam permasalahan pendanaan pembangunan Indonesia. Anggota IGGI terdiri atas dua kelompok, yaitu:

- 1) Badan keuangan dunia, baik regional dan internasional, antara lain Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund), Dana Moneter Internasional, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank, dan juga Bank Dunia (World Bank).
- 2) Negara kreditor, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia, Jerman Barat, Belanda, Jepang, Swiss, Italia, Belgia, Prancis dan juga Inggris.

e. Pembentukan Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)

Perkembangan ekonomi dan dunia pada saat itu berubah dengan cepat, hal itu menjadi latar belakang terbentuknya APEC. Pada saat itu Putaran Uruguay dalam hal masalah perdagangan bebas gagal disepakati. Menimbulkan kekhawatiran akan menimbulkan sikap proteksi dari negara-negara maju.

Indonesia pun sebagai anggota APEC, saat itu ditunjuk sebagai ketua APEC untuk periode 1993 hingga 1995. Berperan sebagai ketua APEC, Indonesia sukses menyelenggarakan Pertemuan APEC di daerah Bogor pada tanggal 14-15 November 1994 yang dihadiri oleh 18 negara. Dan saat sidang APEC di Tokyo pada tahun 1995, memutuskan untuk era perdagangan bebas akan mulai diterapkan di tahun 2003 bagi negara mau dan tahun 2010 untuk negara berkembang.

3. Kebijakan ekonomi Orde Baru

Dalam penataan ulang pemerintahan, bidang ekonomi pun menjadi salah satu persoalan yang segera dibenahi. Untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang kacau pada saat pemerintahan orde lama. Pemerintah orde baru pun melakukan beberapa langkah, sebagai berikut:

1. Dibuatnya ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966. Kebijakan ini merupakan pembaharuan kebijakan pembangunan, keuangan dan ekonomi.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengeluarkan garis program pembangunan, meliputi rehabilitasi dan stabilisasi, serta program penyelamatan.

Langkah-langkah yang diambil oleh Kabinet Ampera yang berdasarkan Ketetapan MPRS yang telah dibuat, adalah:

- ☐ Berorientasi kepada kepentingan produsen kecil.
- ☐ Debirokratisasi untuk melancarkan segala aktivitas perekonomian.
- ☐ Melakukan perbaikan serta mendobrak sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan ekonomi.

4. Kebijakan Sosial dan Budaya Orde Baru

Beberapa kebijakan yang diambil dalam bidang sosial budaya dan kemasyarakatan oleh pemerintahan orde baru, yaitu:

1. Dalam pengendalian gerakan mahasiswa, pemerintah membuat Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan juga Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) di tahun 1978.
2. Pemerintah memberikan posisi kepada Departemen Penerangan untuk mengontrol setiap media masa. Departemen Penerangan pun mengharuskan setiap media masa memiliki SIUPP. Undang-Undang Pokok Pers No 12 tahun 1982 digunakan untuk mengendalikannya. Sehingga, bagi media yang melanggar akan dibatalkan SIUPP-nya.
3. Pemerintah mendukung penuh program Kirap Remaja Indonesia. Parade Keliling Indonesia ini diselenggarakan satu kali dalam dua tahun yang dilaksanakan oleh Yayasan Tiara Indonesia yang dipimpin oleh Mbak Tutut atau Siti Hardijanti Rukmana sejak tahun 1989.
4. Pengontrolan pelajaran sejarah untuk anak sekolah melalui buku dan film G 30 S/PKI yang diputar setiap tahun di tanggal 30 September. Untuk mengingatkan bahaya laten PKI dan memuji kepahlawanan Jenderal Soeharto.

5. Berakhirnya orde baru

Di balik kesuksesan pembangunan di depan, Orde Baru menyimpan beberapa kelemahan. Selama masa pemerintahan Soeharto, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh subur. Korupsi besar yang pertama terjadi tahun 1970-an ketika Pertamina dipegang Ibnu Sutowo. Praktik korupsi menggurita hingga kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 1998. Rasa ketidakadilan mencuat ketika kroni-kroni Soeharto yang diduga bermasalah menduduki jabatan menteri Kabinet Pembangunan VII. Kasus-kasus korupsi tidak pernah mendapat penyelesaian hukum secara adil.

Pembangunan Indonesia berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Bahkan, antara pusat dan daerah terjadi kesenjangan pembangunan karena sebagian besar kekayaan daerah disedot ke pusat. Akhirnya, muncul rasa tidak puas di berbagai daerah, seperti di Aceh dan Papua. Di luar Jawa terjadi kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan pendatang (transmigran) yang memperoleh tunjangan pemerintah. Penghasilan yang tidak merata semakin memperparah kesenjangan sosial.

Pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan dalam bidang sosial dan politik. Pemerintah melarang kritik dan demonstrasi. Oposisi diharamkan rezim Orde Baru. Kebebasan pers dibatasi dan diwarnai pemberedelan koran maupun majalah. Untuk menjaga keamanan atau mengatasi kelompok separatis,

pemerintah memakai kekerasan bersenjata. Misalnya, program ‖Penembakan Misterius‗ (Petrus) atau Daerah Operasi Militer (DOM). Kelemahan tersebut mencapai puncak pada tahun 1997–1998.

a. Dari Krisis Ekonomi ke Krisis Multidimensi (Segala Bidang)

Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997. Krisis moneter dan keuangan yang semula terjadi di Thailand pada bulan Juli 1997 merembet ke Indonesia. Hal ini diperburuk dengan kemarau terburuk dalam lima puluh tahun terakhir. Dari beberapa negara Asia, Indonesia mengalami krisis paling parah. Solusi yang disarankan IMF justru memperparah krisis. IMF memerintahkan penutupan enam belas bank swasta nasional pada 1 November 1997. Hal ini memicu kebangkrutan bank dan negara. BPK menemukan penyimpangan dana sebesar Rp138 triliun atas penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut. Saat itu pemerintah menyalurkan BLBI sekitar Rp700 triliun. Ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi krisis. Sampai bulan Desember 1998, BI menyalurkan BLBI sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank.

Krisis ekonomi mengakibatkan rakyat menderita. Pengangguran melimpah dan harga kebutuhan pokok melambung. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai daerah. Daya beli masyarakat menurun. Bahkan, hingga bulan Januari 1998 rupiah menembus angka Rp17.000,00 per dolar AS. Masyarakat menukarkan rupiah dengan dolar. Pemerintah mengeluarkan ‖Gerakan Cinta Rupiah‗, tetapi tidak mampu memperbaiki keadaan. Krisis moneter tersebut telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Krisis ini ditandai adanya keterpurukan di segala bidang kehidupan bangsa. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin menurun. Pemerintah kurang peka dalam menyelesaikan krisis dan kesulitan hidup rakyat. Kabinet Pembangunan VII yang disusun Soeharto ternyata sebagian besar diisi oleh kroni dan tidak berdasarkan keahliannya. Kondisi itulah yang melatarbelakangi munculnya gerakan reformasi.

b. Gerakan Reformasi

Munculnya gerakan reformasi dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Semula gerakan ini hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus di berbagai daerah. Akan tetapi, para mahasiswa harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan jalan keluar. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai enam agenda antara lain suksesi kepemimpinan nasional, amendemen UUD 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dwifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Berikut ini kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang memuncak pada tahun 1998.

c. Demonstrasi Mahasiswa

Desakan atas pelaksanaan reformasi dalam kehidupan nasional dilakukan mahasiswa dan kelompok proreformasi. Pada tanggal 7 Mei 1998 terjadi demonstrasi mahasiswa di Universitas Jayabaya, Jakarta. Demonstrasi ini berakhir bentrok dengan aparat dan mengakibatkan 52 mahasiswa terluka. Sehari kemudian pada tanggal 8 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa terjadi di Yogyakarta (UGM dan sekitarnya). Demonstrasi ini juga berakhir bentrok dengan aparat dan menewaskan seorang mahasiswa bernama Mozes Gatotkaca. Dalam kondisi ini, Presiden Soeharto berangkat ke Mesir tanggal 9 Mei 1998 untuk menghadiri sidang G 15.

d. Peristiwa Trisakti

Tuntutan agar Presiden Soeharto mundur semakin kencang disuarakan mahasiswa di berbagai tempat. Tidak jarang hal ini mengakibatkan bentrokan dengan aparat keamanan. Pada tanggal 12 Mei 1998 empat mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Mereka adalah Elang Mulya, Hery Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan. Peristiwa Trisakti mengundang simpati tokoh reformasi dan mahasiswa Indonesia.

e. Kerusuhan Mei 1998

Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Kondisi ini memaksa Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan, para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah.

f. Pendudukan Gedung MPR/DPR

Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung DPR/MPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat. Bahkan, mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya menemui pimpinan MPR/DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya, tanggal 18 Mei 1998 Ketua MPR/DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Pernyataan Harmoko itu kemudian dibantah oleh Pangab Jenderal TNI Wiranto dan mengatakannya sebagai pendapat pribadi.

Untuk mengatasi keadaan, Presiden Soeharto menjanjikan akan mempercepat pemilu. Hal ini dinyatakan setelah Presiden Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ke Istana Negara pada tanggal 19 Mei 1998. Akan tetapi, upaya ini tidak mendapat sambutan rakyat.

g. Pembatalan Apel Kebangkitan Nasional

Momentum hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1998 rencananya digunakan tokoh reformasi Amien Rais untuk mengadakan doa bersama di sekitar Tugu Monas. Akan tetapi, beliau membatalkan rencana apel dan doa bersama karena 80.000 tentara bersiaga di kawasan tersebut. Di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua MPR/DPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 22 Mei 1998 atau DPR/MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan dengan itu, sebelas menteri Kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri.

h. Pengunduran Diri Presiden Soeharto

Pada dini hari tanggal 21 Mei 1998 Amien Rais selaku Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan, «Selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang

pemerintahan baru». Ini beliau lakukan setelah mendengar kepastian dari Yuzril Ihza Mahendra.

Akhirnya, pada pukul 09.00 WIB Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Itulah beberapa peristiwa penting menyangkut gerakan reformasi tahun 1998. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. Beliau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Beliau kemudian digantikan B.J. Habibie. Sejak saat itu Indonesia memasuki era reformasi.

BAB X

Masa Reformasi

1. Latar belakang lahirnya reformasi

Reformasi merupakan suatu perubahan catatan kehidupan lama catatanaan kehidupan baru yang lebih baik.Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Dengan demikian, reformasi telah memiliki formulasi atau gagasan tentang tatanan kehidupan baru menuju terwujudnya Indonesia baru.

Persoalan pokok yang mendorong atau menyebabkan lahirnya reformasi adalah kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Harga-harga sembilan bahan pokok (sembako), seperti beras, terigu, minyak goreng, minyak tanah, gula, susu, telur, ikan kering, dan garam mengalami kenaikan yang tinggi. Bahkan, warga masyarakat harus antri untuk membeli sembako itu.

Sementara, situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia semakin tidak menentu dan tidak terkendali. Harapan masyarakat akan perbaikan politik dan ekonomi semakin jauh dari kenyataan. Keadaan itu menyebabkan masyarakat Indonesia semakin kritis dan tidak percaya terhadap pemerintahan Orde Baru.

Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Oleh karena itu, tujuan lahirnya reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi.Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru.Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil.Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi, seperti berikut ini:

a. Krisis politik

Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru.Berbagai kebijakan politik yang

dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto dan kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa.

Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari penguasa, oleh penguasa, dan untuk penguasa. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang represif, di antaranya:

1. Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia).

2. Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa.

3. Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya.

4. Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara (sipil) untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

5. Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Suharto dipilih menjadi presiden melalui Sidang Umum MPR, tetapi pemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.

b. Krisis hukum

Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukum pun, pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan.

Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif).

c. Krisis ekonomi

Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp 2,575.00 menjadi Rp 2,603.00 per dollar Amerika Serikat.

Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5,000.00 per dollar. Bahkan, pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16,000.00 per dollar. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti:

1. Hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi.

2. Industrialisasi, pemerintah Orde Baru ingin menjadikan negara RI sebagai negara industri. Keinginan itu tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah (rata-rata).

3. Pemerintahan Sentralistik, pemerintahan Orde Baru sangat sentralistik sifatnya sehingga semua kebijakan ditentukan dari Jakarta. Oleh karena itu, peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintah daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat.

d. Krisis sosial

Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah.

Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.

e. Krisis kepercayaan

Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan.

f. Kronologi Peristiwa Reformasi

Secara garis besar, kronologi gerakan reformasi dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Sidang Umum MPR (Maret 1998) memilih Suharto dan B.J. Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 1998-2003. Presiden Suharto membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan VII.
- b. Pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut penurunan harga barang-barang kebutuhan (sembako), penghapusan KKN, dan mundurnya Suharto dari kursi kepresidenan.
- c. Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan empat orang mahasiswa (Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, Hafidhin A. Royan, dan Hendriawan Sie) tertembak hingga tewas dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian empat mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran.
- d. Pada tanggal 13-14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga kegiatan masyarakat mengalami kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan toko dibakar dan isinya dijarah, bahkan ratusan orang mati terbakar.
- e. Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki gedung MPR/DPR. Pada saat yang bersamaan, tidak kurang dari satu juta manusia berkumpul di alun-alun utara Keraton Yogyakarta untuk menghadiri pisowanan agung, guna mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam VII. Pada tanggal 19 Mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan MPR/DPR mengeluarkan pernyataan berisi ‘_anjuran agar Presiden Suharto mengundurkan diri’. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Suharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Suharto.

Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 di Istana Negara, Presiden Suharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI di hadapan Ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 8 UUD 1945, kemudian Suharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden RI. Pada waktu itu juga B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI oleh Ketua MA.

Demonstrasi bertambah gencar dilaksanakan oleh para mahasiswa, terutama setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa tuntutan, seperti:

1. Adili Suharto dan kroni-kroninya,
2. Laksanakan amandemen UUD 1945,
3. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI,
4. Pelaksanaan otonomi daerah yang seluasluasnya,
5. Tegakkan supremasi hukum,
6. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.

2. Kondisi politik masa awal reformasi

Prestasi yang dicapai dari gerakan reformasi dalam bidang politik sebagai berikut :

- a. Menegakan kembali demokrasi yang bertumpu pada partisipasi rakyat secara aktif dalam proses politik, pemberian ruang dan kebebasan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan seperti dijamin dalam UUD 1945 pasal 28. Usaha-usaha nyata yang dilakukan oleh pemerintah dalam reformasi di bidang politik sebagai berikut :
 1. Diterbitkannya UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Melalui UU ini, masyarakat diperbolehkan membentuk partai-partai politik sebagai sarana aspirasi politik dan menyuarakan kepentingan rakyat.
 2. Diterbitkannya UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat di Muka Umum. Melalui UU ini, rakyat mulai terbiasa dengan unjuk rasa, demonstrasi, dan dialog interaktif.

- b. Menciptakan Clean Government atau pemerintah yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab. Hal itu dilakukan melalui:
 1. keluarnya Tap MPR No. IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN
 2. UU No. 12 tahun 1999 tentang Kebolehan Pegawai Negeri Sipil Berpartisipasi dalam Partai Politik sebagai Sarana Menyampaikan Aspirasinya.
- c. Kebijakan politik paling kontroversial yang ditempuh pemerintah Indonesia pasca reformasi adalah tawaran pelaksanaan jajak pendapat (referendum) di Timor Timur. Upaya tersebut dilakukan untuk menyelesaikan kasus Timor Timur. Hasil referendum adalah Timor Timur lepas dari wilayah Indonesia dan berdiri sebagai negara sendiri. Dasar hukum pelepasan Timor Timur dan pangkuan Indonesia adalah Tap MPR No. V/MPR/1999 tentang Pencabutan Tap MPR No. VI/MPR/1978. Tap MPR No. VI/MPR/1978 berisi tentang Penggabungan Timor Timur ke NKRI dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

3. Kondisi ekonomi masa awal reformasi

Kemerosotan ekonomi dan moneter pada akhir pemerintah. Soeharto dan awal reformasi coba diatasi oleh para pemimpin nasional. Mereka mengadakan serangkaian kebijakan ekonomi. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengeluarkan Indonesia dari krisis ekonomi. Melalui kebijakan ekonomi, diharapkan bangsa Indonesia mampu menuju kehidupan ekonomi yang lebih stabil sebagai pilar pembangunan. Adapun kebijakan ekonomi yang diambil sebagai berikut:

Optimalisasi fungsi dan kinerja BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dengan memberikan sanksi yang tegas kepada bank-bank yang tidak mematuhi aturan perbankan nasional.

Mendorong terjadinya efisiensi di berbagai sektor. Efisiensi ini dilakukan dengan mencabut puluhan Kepres atau Peraturan Daerah yang dianggap hanya menguntungkan golongan tertentu seperti kasus PAM DKI, PPPC (Badan yang bergerak dalam sektor distribusi cengkeh) yang dimonopoli keluarga Cendana, Mobil Timor, dan sebagainya. Untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat, pemerintah mengadakan beberapa kebijakan. Kebijakan ini bertumpu pada usaha-usaha perbaikan dan pemantapan ekonomi kerakyatan melalui tindakan sebagai berikut:

Perluasan lapangan kerja secara terus-menerus melalui investasi dalam dan luar negeri seefisien mungkin.

Penyediaan barang-barang kebutuhan pokok rakyat sehari-hari untuk memenuhi permintaan pada harga yang terjangkau.

Penyediaan fasilitas umum seperti rumah, air minum, listrik, bahan bakar, komunikasi, angkutan umum dengan harga yang terjangkau.

Penyediaan ruang sekolah, pemerataan guru dan tenaga kependidikan di seluruh wilayah Indonesia, buku-buku untuk pendidikan dengan harga yang terjangkau.

Penyediaan fasilitas kesehatan masyarakat melalui pembukaan klinik, tersedianya dokter dan tenaga kesehatan, obat-obatan dengan harga yang terjangkau.

4. Kondisi sosial masa awal reformasi

Sejak krisis moneter yang melanda pada pertengahan tahun 1997, perusahaan-perusahaan swasta mengalami kerugaian yang tidak sedikit, bahkan pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji dan upah pekerjanya. Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat karena disatu sisi perusahaan mengalami kerugaian yang cukup besar dan disisi lain para pekerja menuntut kenaikan gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji sangat sulit dipenuhi oleh pihak perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK. Para pekerja yang diberhentikan itu menambah jumlah pengangguran, sehingga jumlah pengangguran diperkirakan mencapai 40 juta orang. Pengangguran dalam jumlah yang sangat besar ini akan menimbulkan terjadinya masalah masalah social dalam kehidupan masyarakat. Dampak susulan dari pengangguran adalah makin maraknya tindakan-tindakan criminal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hendaknya pemerintah dengan serius menangani masalah pengangguran dengan membuka lapangan kerja yang dapat menampung para penganggur tersebut. Langkah berikutnya, pemerintah hendaknya dapat menarik kembali para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru untuk menampung para penganggur tersebut. Masalah pengangguran merupakan masalah social dalam kehidupan masyarakat dan sangat peka terhadap segala bentuk pengaruh.



WIKRAMA
YAYASAN PRAWITAMA
Sekolah Menengah Kejuruan
• BISNIS DAN MANAJEMEN
• TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
• PARIWISATA

Jl. Raya Wangun Kel. Sindangsari Bogor
Telp./Faks. (0251) 8242411
e-mail : prohumasi@smkwikrama.net
website : www.smkwikrama.sch.id

SURAT KETERANGAN

No. 421.5/0179/SMK Wikrama/XI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Iin Mulyani, S.Si.**

Jabatan : **Kepala SMK Wikrama Bogor**

Menerangkan bahwa :

Nama : **Elvia Roza, S.Pd.**

NIM : **201315042**

Adalah benar telah melaksanakan kegiatan mengajar dengan membuat modul mata pelajaran Sejarah kelas X (sepuluh) selama Tahun Pelajaran 2020/2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Bogor, 28 November 2020
Kepala SMK Wikrama Bogor

Iin Mulyani
Iin Mulyani, S.Si.

Ilmu yang Amaliah - Amal yang Ilmiah - Akhlakul Karimah